

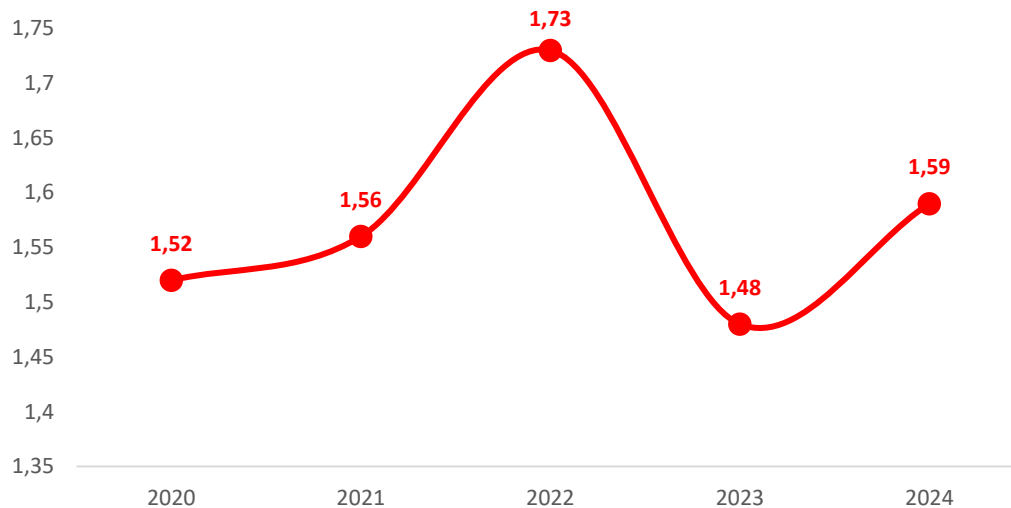
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2025

Gambar 2.56 Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Selain memperhatikan AKB dan AKHB, Angka Kematian Balita juga menjadi indikator penting dalam menilai status Kesehatan anak-anak usia dini. Angka kematian balita merupakan jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Kabupaten Klaten tahun 2024 menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023. Angka kematian balita pada tahun 2024 sebesar 1,59/1000 Kelahiran Hidup. Kondisi ini naik jika dibandingkan Angka Kematian Balita Tahun 2023 sebesar 1,48/ 1000 Kelahiran Hidup.

Naiknya angka kematian balita ini disebabkan karena beberapa hal di antaranya pneumonia, demam berdarah dan penyakit kelainan kongenital. Upaya-upaya yang sudah dilakukan di antaranya: 1) memperbaiki perilaku keluarga dan masyarakat, terutama perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk upaya mencari pelayanan kesehatan serta memperbaiki akses, memperkuat mutu manajemen terpadu penyakit bayi dan balita, memperbaiki kesehatan lingkungan termasuk air bersih dan sanitasi, pengendalian penyakit menular dan pemenuhan gizi yang cukup, 2) memperkecil kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan, 3) perlunya kontribusi berbagai sektor dalam mendukung upaya mencapai derajat kesehatan balita sangat diperlukan, 4) meningkatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan bagi balita dari keluarga miskin.

Berikut perkembangan Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Klaten Tahun 2019-2024 dapat dilihat berikut ini.

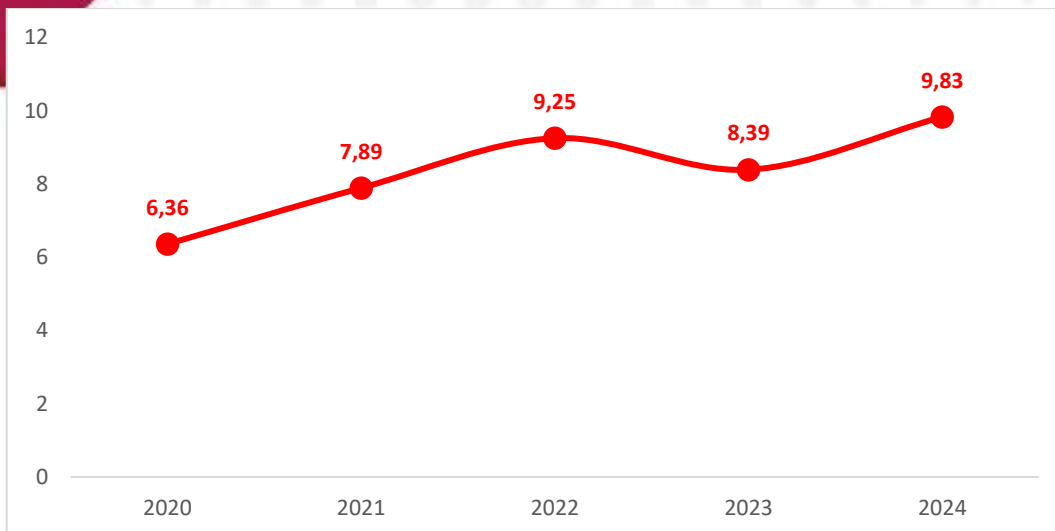


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 2025

Gambar 2.57 Perkembangan Angka Kematian Balita di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Salah satu bagian penting dari angka kematian bayi adalah angka kematian neonatal, yaitu jumlah kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup. Kematian neonatal (bayi umur 0–28 hari) merupakan 2/3 dari kematian bayi. Kematian neonatal dini/perinatal (bayi umur 0–7 hari) merupakan 2/3 dari kematian neonatal. Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup Kabupaten Klaten pada tahun 2024 sebesar 9,83/1000 Kelahiran Hidup dan kondisi ini naik dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 8,39/1000 Kelahiran Hidup. Penyebab kematian terbesar di usia neonatal adalah Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Asfiksia, kelainan kongenital dan sepsis. Upaya Penurunan Angka Kematian Neonatal adalah sebagai berikut: 1) Optimalisasi pelayanan *Antenatal Care* (ANC) pada ibu hamil, 2) Pemberdayaan pada ibu hamil dan keluarga dalam membaca buku KIA, 3) Pelaksanaan kelas ibu hamil, 4) Menkuatkan kader Posyandu, 5) Kunjungan Neonatus dan 6) Pemantauan di Posyandu.

Perkembangan Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Klaten Tahun 2019-2024 dapat dilihat berikut ini.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 2025

Gambar 2.58 Perkembangan Angka Kematian Neonatal di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Cakupan imunisasi dasar juga menjadi indikator penting dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi. Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) adalah suatu keadaan tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi (anak dibawah umur 1 tahun). Dapat dilihat dari tabel bahwa Cakupan desa UCI di Kabupaten Klaten sudah tercapai 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh desa/kelurahan telah berhasil memberikan imunisasi dasar lengkap kepada bayi sesuai standar nasional. Namun tantangan masih terlihat dalam penanganan kasus gizi buruk. Kasus gizi buruk yang mendapat penanganan sesuai PGBT sudah sekitar 99,62%. Capaian ini menunjukkan respons yang baik, namun tetap diperlukan penguatan pada aspek pencegahan dan penanganan dini agar kasus gizi buruk dapat diminimalkan secara berkelanjutan.

Berikut perkembangan cakupan penanganan gizi di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024.

**Tabel 2.35
Perkembangan Cakupan Penanganan Gizi
Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024**

Indikator	Satuan	Capaian Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	100	100
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	32,6	54,1	99,62

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 2024



Berdasarkan data yang ada, semua indikator terkait cakupan penanganan penyakit yang diderita penduduk di Kabupaten Klaten semakin menurun. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak/MR, Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk, Cakupan balita pneumonia yang ditangani, Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS, Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS mengalami penurunan di tahun 2024. Sedangkan penderita diare yang ditangani dan angka kejadian malaria mengalami peningkatan di tahun 2024. Untuk ke depannya, upaya penanganan penyakit menular maupun tidak menular akan jauh lebih ditingkatkan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Klaten.

Tahun 2024 sampai dengan bulan Mei terdapat peningkatan kasus DBD yang sangat signifikan, jumlah kasus penderita DBD tahun ini sudah melebihi kasus tahun kemarin sebesar 393 kasus sedangkan tahun 2023 kasus DBD sebesar 308 kasus. Secara lengkapnya dapat dilihat pada tabel perkembangan cakupan penanganan penyakit yang diderita penduduk di Kabupaten Klaten Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.36
Perkembangan Cakupan Penanganan Penyakit yang Diderita Penduduk
Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Capaian Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak/ MR	%	88,40	99,70	106,10	104,90	87,60
Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	%	83,33	120,00	100,00	128,57	114,29
Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	29,33	29,80	29,05	43,71	40,65
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	29,98	31,70	36,60	37,20	*
Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100.000 penduduk	46,04	86,30	122,70	133,50	*
Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100.000 penduduk	1,96	2,60	2,90	4,20	*
Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	31,44	47,20	51,10	88,60	85,43
Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	71,63	87,60	85,60	88,29	85,43
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100
Penderita diare yang ditangani	%	4,40	3,40	3,50	4,600	6,55

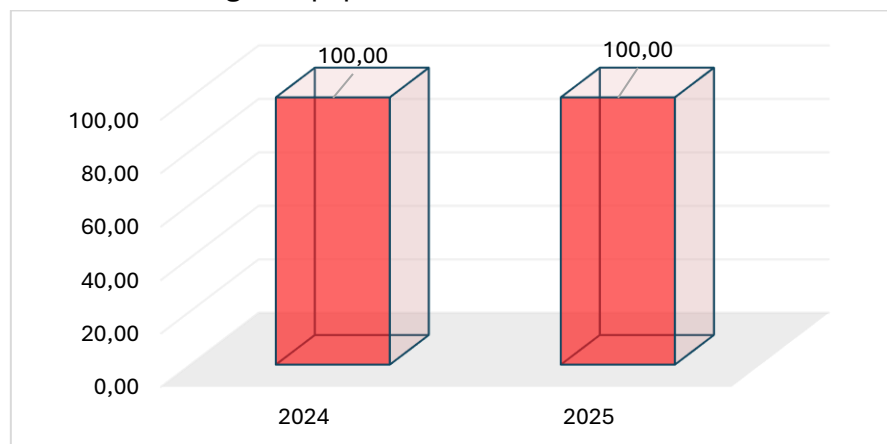


Indikator	Satuan	Capaian Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
Angka kejadian Malaria	Per 100.000 penduduk	0,0033	0,77	0,60	0,90	0,39
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,011	0,010	0,010	0,011	*

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 2024

Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah munculnya atau meningkatnya kasus kesakitan dan/atau kematian yang signifikan secara epidemiologis di suatu desa atau kelurahan dalam kurun waktu tertentu. Situasi ini memerlukan respons cepat dan tepat, yaitu tindakan penanggulangan dan pelaporan yang dilakukan dalam waktu kurang dari 24 jam kepada otoritas kesehatan terkait.

Pelaksanaan penyelidikan epidemiologi yang cepat sangat penting untuk mencegah penyebaran lebih lanjut serta meminimalkan dampak KLB terhadap masyarakat. Dari tahun 2020 hingga 2024, cakupan penyelidikan epidemiologi terhadap KLB yang dilakukan dalam waktu kurang dari 24 jam mencapai 100%, menunjukkan respons yang sigap dan efektif dari sistem kesehatan dalam menghadapi potensi wabah.



Gambar 2.59 Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Derajat kesehatan masyarakat suatu negara dipengaruhi oleh keberadaan sarana kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa fasilitas pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/ atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Gambaran rasio ketersediaan sarana prasarana serta tenaga medis di Kabupaten Klaten sebagai salah satu indikator untuk mengetahui cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Rasio posyandu per satuan balita



pada setiap tahunnya meningkat dikarenakan adanya penambahan jumlah posyandu. Sedangkan rasio puskesmas, RS, dokter dan tenaga medis di Kabupaten Klaten masih diperlukan peningkatan agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Tabel 2.37

**Perkembangan Rasio Ketersediaan Sarpras dan Tenaga Medis
Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024**

Indikator	Capaian Tahun Ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio posyandu per satuan balita	28,00	29,01	30,17	30,95	35,73
Rasio puskesmas, pustu per satuan penduduk	0,29	0,29	0,009	0,009	0,009
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,01	0,01	0,001	0,001	0,001
Rasio dokter per satuan penduduk	0,026	0,06	0,059	0,059	0,059
Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0,05	0,03	0,718	0,718	0,718

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 2024

Sarana kesehatan yang paling menonjol di Kabupaten Klaten saat ini adalah keberadaan tenaga medis swasta berizin, khususnya tenaga dokter, yang pada tahun 2024 tercatat sebanyak 460 orang. Namun, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara merata, diperlukan peningkatan peran serta pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini dikarenakan masih adanya kesenjangan akses layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat dari kalangan ekonomi rendah, yang kerap mengalami kendala dalam memperoleh layanan kesehatan yang layak. Dengan keterlibatan aktif pemerintah, diharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang adil dan merata.

Tabel 2.38

**Ketersediaan Sarana Prasarana Kesehatan yang Berizin
di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024**

Sarana dan Prasarana Kesehatan		Capaian Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
SWASTA						
1	Rumah Sakit	9	9	9	10	10
2	Balai Pengobatan	-	-	-	-	
3	Rumah Bersalin	-	-	-	-	
4	Dokter Praktek	461	461	461	389	460
5	Apotek	107	107	107	108	199
6	Toko Obat	1	1	1	2	2
NEGERI						
1	Rumah Sakit Umum	2	2	2	2	2
2	Rumah Sakit Jiwa	1	1	1	1	1

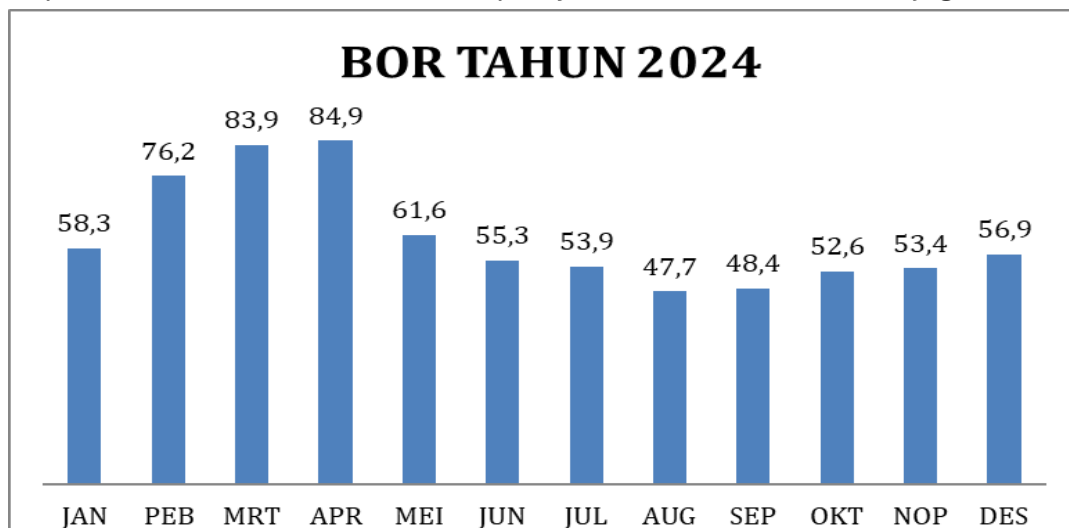


Sarana dan Prasarana Kesehatan		Capaian Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	Apotek Daerah	1	1	1	1	1
4	Toko Obat Berijin	1	1	1	0	0
5	Balai Pengobatan Kesehatan Paru Masyarakat	1	1	1	1	1
6	Puskesmas / Balai Pengobatan	34	34	34	34	34
7	Puskesmas Pembantu	84	84	84	84	84
8	Puskesmas Yang Ada Fasilitas Rawat Inap	15	15	15	15	15

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2024

Salah satu indikator kinerja pelayanan fasilitas kesehatan di Kabupaten Klaten ditunjukkan melalui Rumah Sakit Daerah (RSUD) Bagas Waras, khususnya melalui indikator *Bed Occupancy Rate* (BOR) atau tingkat pemanfaatan tempat tidur. BOR memberikan gambaran efisiensi penggunaan fasilitas rawat inap. Nilai ideal BOR menurut Kementerian Kesehatan RI berada di kisaran 60-85%. Pada tahun 2024, BOR RSUD Bagas Waras tercatat sebesar 61,17%, yang berarti berada dalam kategori ideal. Capaian ini menunjukkan bahwa layanan rawat inap berjalan efisien dengan kapasitas yang masih mencukupi tanpa kelebihan beban.

Capaian BOR tahun 2024 menunjukkan bahwa RSUD Bagas Waras telah memberikan pelayanan rawat inap secara optimal. Meski demikian, pemerintah tetap perlu melakukan pemantauan dan evaluasi rutin agar BOR tetap dalam batas ideal dan kualitas pelayanan kesehatan terus terjaga.



Sumber : RSD Bagas Waras Kab. Klaten, 2024

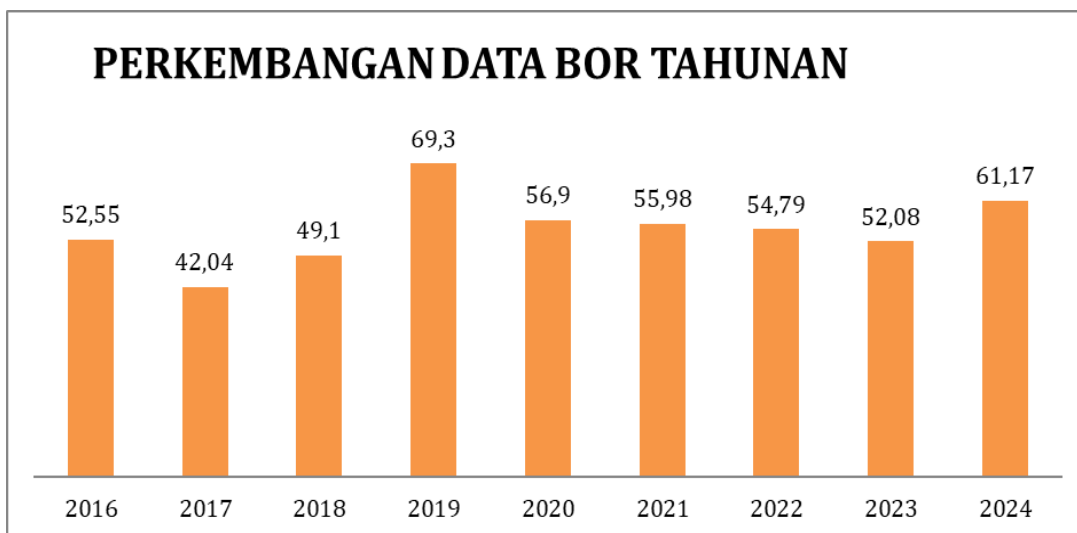
Gambar 2.60 Perkembangan Indikator BOR Bulanan (Persentase Pemakaian Tempat Tidur Pada Satuan Waktu Tertentu)

Tahun 2024, jumlah kunjungan pasien sebanyak 119.343 jiwa dengan rincian: 1). Rata-rata kunjungan rawat inap sebanyak 9616 orang/tahun (atau



rata-rata 26 orang/hari), 2). Rata-rata kunjungan rawat jalan sebanyak 99828 orang/tahun (atau rata-rata 272 orang/hari) dan 3). Rata-rata kunjungan IGD sebanyak 9.899 orang/tahun (atau rata-rata 27 orang/hari).

Kondisi menunjukkan bahwa pelayanan rawat jalan menjadi layanan yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, mencerminkan tingginya kebutuhan terhadap layanan medis non-emergensi dan kontrol rutin. Sementara itu, angka kunjungan rawat inap dan IGD yang relatif stabil menunjukkan bahwa pelayanan emergensi dan perawatan intensif masih dalam batas kapasitas yang dapat ditangani rumah sakit. Hal ini dapat menjadi dasar bagi perencanaan penguatan layanan rawat jalan, seperti peningkatan jumlah tenaga medis, penambahan ruang pemeriksaan, serta pengembangan sistem antrean digital untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi pelayanan.



Sumber : RSUD Bagaswaras Kab. Klaten, November 2024

Gambar 2.61 Perkembangan Indikator BOR Tahunan (%) (Persentase Pemakaian Tempat Tidur Pada Satuan Waktu Tertentu)

Pada tahun 2024, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mencapai 119,9%, melebihi target sebesar 20% atau 2.269 kasus. Jumlah kasus aktual mencapai 2.720 kasus, mencakup komplikasi saat kehamilan, persalinan dan masa nifas. Jenis komplikasi terbanyak antara lain: KEK (Kekurangan Energi Kronik) sebanyak 917 kasus; Anemia Trimester 1 & 2 sebanyak 414 dan 362 kasus; Preeklampsia/eclampsia sebanyak 270 kasus; Perdarahan sebanyak 174 kasus; Obesitas sebanyak 117 kasus; sepsis sebanyak 35 kasus, Tuberculosis sebanyak 2 kasus; Jantung sebanyak 6 kasus, DM sebanyak 24 Kasus; dan lain-lain sebanyak 354 kasus.

Tingginya kasus hipertensi dalam kehamilan menjadi perhatian utama, sehingga skrining preeklampsia sesuai Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) versi





tahun 2020 perlu lebih dioptimalkan. Di sisi lain, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten masih menunjukkan tren fluktuatif, yang berisiko terhadap keselamatan ibu dan bayi. Tantangan ini perlu diatasi dengan peningkatan akses layanan, edukasi kepada masyarakat, serta distribusi tenaga kesehatan yang lebih merata, khususnya di wilayah dengan akses terbatas.

Tingginya angka komplikasi kebidanan menunjukkan perlunya penguatan sistem deteksi dini dan perawatan ibu hamil. Di sisi lain, fluktuasi cakupan layanan persalinan oleh tenaga terlatih menegaskan pentingnya pemerataan tenaga kesehatan dan peningkatan kualitas layanan untuk menekan risiko kematian ibu dan bayi.

Tabel 2.39
Perkembangan Cakupan Kebidanan Kabupaten Klaten
Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Capain Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	84,40	82,61	76,18	125,04	119,9
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	99,99	100	99,99	99,98	99,89

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 2024

Cakupan pelayanan bayi di tahun 2024 sudah di atas target yang ditetapkan artinya telah dilakukan pelayanan kunjungan bayi sesuai standar dimana dipantau pertumbuhan sebanyak minimal 8 kali, dipantau perkembangan sebanyak 2 kali dan diberikan pelayanan standar pada bayi. Capaian indikator cakupan kunjungan ibu hamil pada tahun 2024 sebesar 97,09 %, yang artinya masih ada ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya pertama kali lebih dari 12 minggu dan masih ada ibu dengan kehamilan yang tidak diinginkan sehingga saat hamalnya tidak dipantau oleh tenaga kesehatan.

Cakupan pelayanan nifas pada tahun 2024 sebesar 97,71 % dan kinerja ini sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Artinya tenaga kesehatan sudah memberikan pelayanan nifas lengkap dari kunjungan nifas 1, 2, 3 dan 4 sesuai dengan standar pelayanan kunjungan nifas. Indikator cakupan neonatus komplikasi yang ditangani pada tahun 2024 sebesar 67,62 % dan ini masih di bawah target yang ditetapkan. Diharapkan tenaga kesehatan dapat mendeteksi kasus komplikasi-komplikasi neonatus sejak dini sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi. Cakupan pelayanan anak balita pada tahun 2024 sebesar 98,24%, sehingga masih ada balita yang belum mendapatkan pelayanan balita sesuai standar dikarenakan balita tidak



mengukur berat badan minimal 8 kali setahun, tidak dipantau perkembangannya dan lain – lain.

Tabel 2.40
Perkembangan Cakupan Pelayanan Kesehatan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Capaian Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	9,09	12,63	11,7	12,8	13,8
Cakupan kunjungan bayi	%	96,89	68,13	96,93	98,79	99,79
Cakupan puskesmas	%	130	130	130	130	130
Cakupan pembantu puskesmas	%	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	93,33	95,24	93,15	94,63	97,09
Cakupan pelayanan nifas	%	96,92	98,47	98,54	97,39	97,71
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	55,63	57,57	64,33	67,98	67,62
Cakupan pelayanan anak balita	%	92,71	67,75	95,97	98,55	98,24

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 2024

Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Bahwa urusan kesehatan merupakan urusan wajib dasar yang memiliki 12 indikator SPM yang harus dipenuhi.

Pada tahun 2024 terdapat 3 indikator SPM yang capaiannya belum 100%, yaitu Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil, Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan dan Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir. Hal ini mencerminkan bahwa masih terdapat tantangan dalam optimalisasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, baik dari sisi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun aksesibilitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan dan masyarakat miskin.

Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih intensif dan terintegrasi untuk meningkatkan capaian indikator SPM tersebut, termasuk melalui penguatan sistem pencatatan dan pelaporan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta pelibatan aktif masyarakat dalam upaya promotif dan preventif.

Berikut capaian SPM urusan kesehatan Kabupaten Klaten tahun 2020-2024.



Tabel 2.41
Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Kabupaten Klaten
Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Capaian Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil	%	93,44	95,24	100	100	85,88
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	99,99	100	99,99	100	94,46
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	96,70	98,21	100	100	93,24
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	92,71	0,66	95,16	100	100
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	31,13	58,28	94,03	100	100
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	73,26	84,98	100	100	100
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	73,14	93,41	100	100	100
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	32,38	68,16	100	100	100
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	90,76	100	100	100	100
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	88,32	96,45	100	100	100
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	29,28	24,65	100	100	100
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	86,08	88,35	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2025

2.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan merupakan indikator penting pembangunan daerah karena berperan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kabupaten



Klaten menunjukkan tren positif di sektor ini, tercermin dari meningkatnya Angka Harapan Lama Sekolah dari 13,41 tahun (2023) menjadi 13,48 tahun (2024), serta Rata-rata Lama Sekolah dari 9,27 menjadi 9,29 tahun. Peningkatan ini mencerminkan membaiknya partisipasi pendidikan, terutama didorong oleh intervensi kebijakan pemerintah daerah melalui program Wajib Pendidikan Dasar dan dukungan BOS daerah. Capaian ini menunjukkan komitmen Kabupaten Klaten dalam membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing melalui pemerataan akses dan mutu pendidikan.

Tabel 2.42
Perkembangan Capaian Pembangunan Urusan Pendidikan di
Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,25	13,39	13,40	13,41	13,48
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,58	8,81	9,09	9,27	9,29

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Salah satu hak warga negara adalah memperoleh akses Pendidikan yang merata bagi semua orang. Untuk memenuhi hak tersebut pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, serta memastikan semua penduduk usia sekolah mengenyam Pendidikan. Keberhasilan pencapaian Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun salah satunya ditandai dengan tingkat partisipasi pendidikan. Partisipasi pendidikan digambarkan sebagai jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan merupakan salah satu indikator pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan. Semakin tinggi angka partisipasi berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 terbanyak adalah APS di rentang usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun, sedangkan untuk APS Usia 16-18 tahun masih di bawah 85 % dikarenakan saat ini masih banyak warga yang belum mampu mengakses layanan pendidikan. Hal itu terlihat dari rendahnya capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) terutama pada jenjang pendidikan menengah. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut.



Tabel 2.43
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Klaten
Tahun 2020-2024

Indikator APS	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
APS Usia 7-12 Tahun	101,01	95,84	96,26	102,21	97,99
APS Usia 13-15 Tahun	91,88	91,93	72,13	75,7	99,99
APS Usia 16-18 Tahun	77,09	79,92	80,12	80,23	75,07

Sumber: BPS. 2024

Pendidikan dasar terdiri dari jenjang pendidikan SD dan SMP, pengelolaan pendidikan dasar merupakan kewenangan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota oleh karena itu semua penyelenggaraan pendidikan dasar menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota. Penyelenggaraan pendidikan dasar diukur melalui beberapa indikator salah satunya Angka Partisipasi Kasar (APK), merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK mengindikasikan partisipasi sekolah penduduk sesuai jenjang pendidikannya. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut.

Capaian APK jenjang Pendidikan SD/MI/Paket A dari tahun 2020-2024 menunjukkan besaran yang fluktuatif. Jika pada tahun 2020 ke tahun 2022 mengalami penurunan, namun mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami kenaikan kenaikan dari 103,03% di tahun 2022 naik menjadi 101,80% di tahun 2023, tetapi mengalami penurunan kembali di tahun 2024 menjadi sebesar 101,65%. Sama halnya dengan APK SMP/MTs/Paket B juga mengalami perkembangan yang fluktuatif dari tahun ke tahun, terakhir pada tahun 2024 APK SMP/MTs/Paket B sebesar 85,35.

Kondisi yang sama perkembangan nilai APK SMA/SMK/MA/Paket C mengalami perkembangan yang fluktuatif, terakhir di tahun 2024 APK SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 99,83 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Fluktuasi nilai APK di setiap jenjang pendidikan ini mencerminkan perlunya penguatan kebijakan pemerataan akses pendidikan, khususnya untuk jenjang menengah pertama, serta upaya pelacakan dan penanganan dini terhadap anak usia sekolah yang berpotensi tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Nilai APK di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.44
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar dan Menengah
Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator APK	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
APK SD/MI/Paket A	%	96,02	91,65	91,5	98,43	101,65
APK SMP/MTs/Paket B	%	100,48	98,62	93,55	98,35	85,35
APK SMA/ SMK/ MA/ Paket C	%	86,28	86,66	85,81	86,61	99,83

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 2024

Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur sejauh mana anak usia sekolah mengikuti pendidikan pada jenjang yang sesuai usianya. APM lebih akurat untuk menilai partisipasi pendidikan karena hanya mencakup siswa yang bersekolah tepat waktu. Jika semua anak usia sekolah bersekolah sesuai jenjang, APM akan mencapai 100%. Berbeda dengan Angka Partisipasi Kasar (APK), APM cenderung lebih rendah karena APK juga menghitung siswa di luar usia sekolah.

Indikator APM SD/MI/Paket A pada tahun 2024 sebesar 97,67% kondisinya meningkat dibanding tahun sebelumnya. Pada APM SMP/MTs/ Paket B juga menunjukkan peningkatan dari sebesar 74,6 ditahun 2023 menjadi 79,38% ditahun 2024. Demikian pula untuk APM SMA/SMK/MA/Paket C pada tahun 2024 sebesar 66,38%. Hal ini mencerminkan upaya yang efektif dalam meningkatkan partisipasi pendidikan pada jenjang dasar. Namun, perlu perhatian khusus untuk jenjang menengah agar partisipasi tetap optimal.

Tabel 2.45
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar
dan Menengah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator APM	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
APM SD/MI/Paket A	%	88,54	83,91	84,15	91,9	97,67
APM SMP/MTs/Paket B	%	71,14	72,11	68,12	74,4	79,38
APM SMA/SMK/MA/Paket C	%	63,58	64,63	59,29	65,58	66,38

Sumber: BPS, 2024

Kualitas pendidikan dapat diukur melalui berbagai indikator, salah satunya adalah angka putus sekolah, yang mencerminkan persentase peserta didik yang tidak menyelesaikan pendidikan pada suatu jenjang tertentu. Angka ini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas sistem pendidikan dalam mempertahankan peserta didik hingga lulus.

Pada jenjang SD/MI, angka putus sekolah pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,02 sama seperti tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa tingkat keberlanjutan pendidikan dasar masih cukup stabil dan terkendali.



Sementara itu, pada jenjang SMP/MTs, terjadi penurunan angka putus sekolah, dari 0,04 pada tahun 2023 menjadi 0,03 pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam upaya menjaga keberlanjutan pendidikan pada tingkat menengah pertama, baik melalui intervensi program pemerintah, peran serta sekolah, maupun dukungan masyarakat.

Meskipun angka putus sekolah relatif rendah, hal ini tetap perlu menjadi perhatian agar tidak terjadi peningkatan di masa mendatang, khususnya dengan memperkuat sistem deteksi dini terhadap anak-anak yang berisiko putus sekolah dan memperluas akses terhadap layanan pendidikan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik.

Tabel 2.46
Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kabupaten Klaten
Tahun 2020-2024

Indikator Angka Putus Sekolah (APS)	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Angka putus sekolah SD/MI	%	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
Angka putus sekolah SMP/MTs	%	0,08	0,05	0,07	0,04	0,03

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2025

Angka kelulusan jenjang SD/MI maupun SMP/MTs pada tahun 2024 sebesar 100%. Angka kelulusan siswa tidak lagi ditentukan dengan Ujian Nasional, namun berdasarkan nilai Raport. Kebijakan Kemendikbudristek bahwa Ujian Nasional diganti dengan Asesmen Nasional (AN) dan pelaksanaan Asesmen Nasional untuk jenjang SD/MI adalah siswa Kelas V, jenjang SMP/MTs siswa Kelas VIII.

Tabel 2.47
Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Kabupaten Klaten
Tahun 2020-2024

Indikator Angka Kelulusan (AL)	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
AL SD/MI	%	100	100	100	100	100
AL SMP/MTs	%	100	100	100	100	100
AL SMA/SMK/MA	%	99,75	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2024

Angka melanjutkan sekolah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas manajemen pelayanan pendidikan, khususnya dalam hal transisi peserta didik dari satu jenjang ke jenjang berikutnya. Pada tahun 2024, angka melanjutkan sekolah dari jenjang SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten Klaten tercatat sebesar 102,05%. Capaian ini melebihi angka ideal 100%, Hal ini disebabkan beberapa faktor di antaranya lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs di luar Klaten, karena mengikuti orang tua yang merantau bekerja, atau melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren.



Tabel 2.48
Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kabupaten Klaten
Tahun 2020-2024

Indikator Angka Melanjutkan (AM)	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
AM dari SD/MI ke SMP/MTs	%	99,73	100,11	99,22	102,19	102,05
AM dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	%	92,55	91,98	88,37	-	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2024

Mutu pendidikan lainnya tergambarkan melalui kondisi sapsras pendidikan Klaten. Kondisi sarana prasarana pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik selama kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami kondisi fluktuatif, dari 67,10% di tahun 2020 naik menjadi 83,07% di tahun 2024. Begitu juga untuk sekolah Pendidikan SMP/MTs serta SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik tahun 2020 sebesar 74,35%, mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2024 menjadi 80,00%. Berdasarkan rasio ketersediaan sekolah di Kabupaten Klaten telah terpenuhi termasuk untuk rasio ketersediaan guru, sedangkan proporsi dan partisipasi penduduk dalam pendidikan telah terpenuhi.

Tabel 2.49
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Klaten
Tahun 2020-2024

Indikator Fasilitas Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
SARANA PRASANA						
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	68,87	71,36	67,10	67,10	83,07
Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	74,35	88,01	82,70	82,70	80,00
RASIO						
Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah pendidikan dasar	%	1 : 71	1 : 71	1 : 72	1 : 187	1 : 206
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%	1 : 25	1 : 20	1 : 19	1 : 17	1 : 21
Rasio guru/murid PAUD	%	1 : 9	1 : 12	1 : 13	1 : 13	1 : 15
Rasio guru/murid SD/MI dasar	Rasio	1 : 14	1 : 13	1 : 13	1 : 14	1 : 16
Rasio guru terhadap murid SMP/MTs	Rasio	1 : 15	1 : 15	1 : 16	1 : 17	1 : 19
Rasio guru/murid per kelas rata-rata SD/MI	Rasio	1 : 28	1 : 28	1 : 28	1 : 28	1 : 28
Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata SMP/MTs	Rasio	1 : 32	1 : 32	1 : 32	1 : 32	1 : 32
PROPORSI & PARTISIPASI PENDUDUK						



Indikator Fasilitas Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	%	100,00	95,93	100,00	100,00	100
Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	%	99,59	99,60	99,66	99,68	99,87
Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Orang	1.035.959	981.563	983.220	1.007.542	1.023.138
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	87,97	89,79	90,11	91,81	98,55
Penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	94,10	94,55	87,11	98,92	98,65
Penduduk usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	73,97	67,26	43,05	92,14	92,98
Penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI)	%	88,54	83,91	84,15	99,67	99,45
Penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP/MTs)	%	71,14	72,11	68,12	97,47	98,03
Penduduk usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	5,79	0,84	1,34	10,91	13,9

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2024

Ketersediaan sarana pendidikan tersebar di seluruh kecamatan, rincian sarana pendidikan skala lingkungan yaitu TK/ RA/ BA dan SD/ MI adalah: terdapat 538 unit TK, 422 unit RA/ BA, 707 unit SD dan 87 unit MI. Sedangkan rincian sarana untuk SMP/ MTs dan SMA/ MA/SMK adalah: 117 unit SMP, 24 unit MTs, 25 unit SMA, 8 unit MA dan 53 unit SMK. Terdapat juga 9 perguruan tinggi yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Klaten.

Sebaran sarana pendidikan tingkat dasar dan menengah sudah merata di seluruh kecamatan, hanya tingkat pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi yang belum tersedia di setiap kecamatan. Kecamatan yang belum tersedia sarana pendidikan menengah atas adalah Kecamatan Kemalang, Kalikotes dan Kebonarum. Sarana pendidikan menengah atas dan sarana pendidikan tinggi sebagian besar berada di kawasan perkotaan Klaten dan sekitarnya. Untuk melihat sebaran sarana pendidikan di Kabupaten Klaten dirinci per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.50
Sebaran Sarana Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2024

No	Kecamatan	TK	RA	SD	MI	SMP	MTs	SMA	MA	SMK	PT
1	Kec. Prambanan	18	14	25	2	3	1	1	1	2	-
2	Kec. Gantiwarno	21	6	24	2	5	1	1	-	2	-
3	Kec. Wedi	18	12	32	-	6	1	1	-	1	-
4	Kec. Bayat	25	14	35	4	6	1	1	-	1	-
5	Kec. Cawas	27	19	37	1	7	1	1	-	3	-
6	Kec. Trucuk	26	38	34	9	7	2	-	-	1	-
7	Kec. Kalikotes	9	13	20	4	2	1	-	-	-	-
8	Kec. Kebonarum	9	8	10	2	1	-	-	-	-	1
9	Kec. Jogonalan	24	19	27	2	5	-	1	-	4	-
10	Kec. Manisrenggo	20	11	28	4	4	1	-	-	1	-
11	Kec. Karangnongko	14	13	20	3	2	1	1	-	-	-
12	Kec. Ngawen	4	34	21	6	4	-	1	-	1	-
13	Kec. Cepher	27	25	34	9	3	2	1	1	3	2
14	Kec. Pedan	19	15	24	3	4	1	1	-	4	-
15	Kec. Karangdowo	20	16	23	5	3	1	1	-	1	-
16	Kec. Juwiring	31	17	35	7	6	1	1	-	1	-
17	Kec. Wonosari	36	15	37	2	3	1	1	1	2	-
18	Kec. Delanggu	22	11	30	-	8	-	1	-	2	-
19	Kec. Polanharjo	24	12	28	6	3	-	1	-	-	-
20	Kec. Karanganom	27	18	27	5	6	1	1	1	-	-
21	Kec. Tulung	26	17	27	7	4	1	-	-	1	-
22	Kec. Jatinom	21	22	36	1	5	2	1	1	2	-
23	Kec. Kemalang	15	5	23	-	3	1	-	-	-	-
24	Kec. Klaten Selatan	16	14	22	-	5	-	3	-	5	1
25	Kec. Klaten Tengah	20	15	30	-	4	1	-	-	6	2
26	Kec. Klaten Utara	19	19	18	3	8	2	5	3	10	3
TOTAL		538	538	422	707	87	117	24	25	8	53

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Klaten, 2024

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia enam tahun. Penyelenggaraan PAUD yang bertujuan untuk memberikan bekal dan kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut khususnya kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar. Pada tahun 2024, terdapat 926 lembaga PAUD di Kabupaten Klaten, yang meliputi kelompok bermain, tempat penitipan anak, satuan PAUD sejenis, serta Raudhatul Athfal (RA) dan Bustanul Athfal (BA). Selain itu, jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) tercatat sebanyak 603 lembaga.



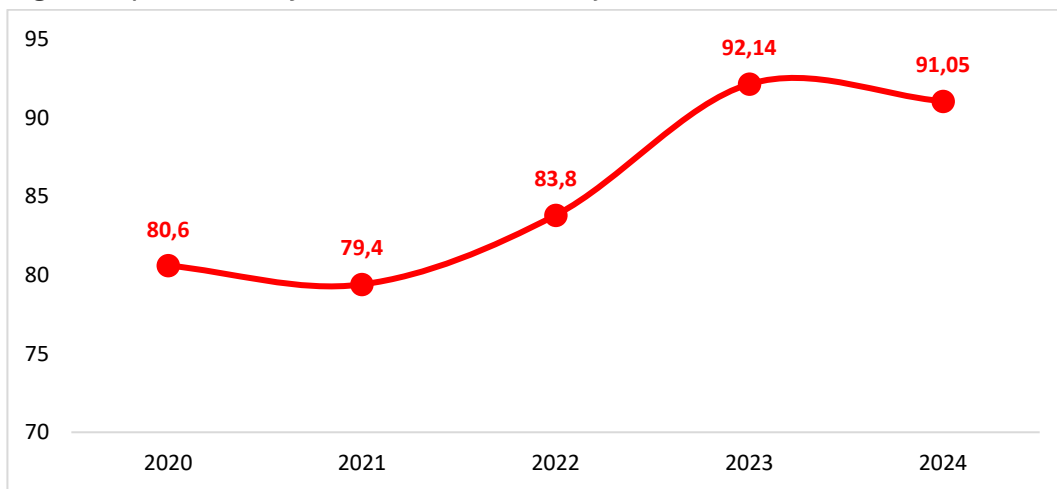
Tabel 2.51
Data Pokok Pendidikan Non Formal dan Anak Usia Dini di
Kabupaten Klaten Tahun 2024

No	Uraian	Lembaga	Peserta Didik		Jumlah	Pendidik
			L	P		
1	Satuan PAUD Sejenis	9	74	86	160	8
2	Taman Penitipan Anak	24	195	183	378	48
3	Kelompok Bermain	471	4993	4819	9812	663
4	RA/BA	422	9.719	9.257	19.976	1.086
5	TK	603	9572	9034	18606	1131
	PAUD	1.529	24.553	23.379	48.932	2.936

Sumber: Dinas Pendidikan Kab Klaten, 2024

Penduduk yang terlayani pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih tergantung pada partisipasi dan kemudahan orang tua untuk mencapai sekolah anak-anaknya. Sementara itu pendidikan usia dini masih kurang partisipasinya dari masyarakat dikarenakan pengetahuan akan pentingnya pendidikan usia dini sangat minim informasi dan sosialisasi tergantung pada pemangku kebijakan khususnya di Kabupaten Klaten.

Perkembangan capaian APK PAUD di Kabupaten Klaten pada tahun 2021 hingga tahun 2024 mengalami perkembangan fluktuatif, yaitu pada tahun 2021 hingga tahun 2023 menunjukkan kenaikan dan pada tahun 2024 ini mengalami penurunan yaitu dari 92,14% menjadi 91,05% di tahun 2024.



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2024

Gambar 2.62 Perkembangan APK PAUD Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) merujuk kepada lembaga atau program pendidikan yang tidak mengikuti struktur dan kurikulum formal seperti yang ada di sekolah umum. Berbeda dengan pendidikan formal yang biasanya diatur oleh pemerintah dan terstruktur secara ketat, pendidikan nonformal



bersifat lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi khusus masyarakat atau individu.

SPNF tidak terikat pada aturan dan struktur yang sama ketatnya seperti pendidikan formal. Ini memungkinkan untuk menyesuaikan kurikulum dan metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta.

Program nonformal sering kali ditujukan untuk kelompok-kelompok tertentu yang tidak tercakup atau kesulitan mengakses pendidikan formal, seperti orang dewasa yang ingin meningkatkan keterampilan kerja atau masyarakat pedesaan yang sulit dijangkau oleh lembaga pendidikan formal. Meskipun tidak formal, SPNF memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan berusaha mencapai hasil pembelajaran yang dapat diukur. Contohnya termasuk kursus keterampilan, pelatihan kejuruan, atau program literasi.

Dengan kelebihan fleksibilitasnya, Satuan Pendidikan Nonformal memainkan peran penting dalam memperluas akses pendidikan dan memenuhi kebutuhan belajar sepanjang hidup, terutama bagi mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal atau membutuhkan pendekatan pendidikan yang lebih individual dan relevan.

Di Kabupaten Klaten terdapat Satuan Pendidikan Non Formal milik Pemerintah Daerah yaitu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Klaten yang berada di Cawas dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat. Berikut disajikan data eksisting Satuan Pendidikan Non Formal tahun 2024.

Tabel 2.52
Data Pokok Satuan Pendidikan Non Formal Kabupaten Klaten Tahun 2024

NO	NPSN	Nama PKBM	Alamat	Status	Akreditasi			
					A	B	C	Belum
1	P9984266	PKBM Ar Royyan	Ngolodono, Karangdowo	Aktif				Belum
2	P9998228	PKBM Banyutowo	Solodiran, Manisrenggo	Aktif				Belum
3	P2970284	PKBM Cipta Kharisma	Socokangsi, Jatinom	Aktif				Belum
4	P2970282	PKBM Dewi Fortuna	Danguran, Klaten Selatan	Aktif	A			
5	P9926277	PKBM Harapan Bangsa	Jambakan, Bayat	Aktif		B		
6	P9970448	PKBM Ibnu Abbas Klaten	Ketandan, Klaten Utara	Aktif				Belum
7	P2970283	PKBM Karsa Mandiri	Beku, Karanganom	Tidak Aktif				Belum
8	P9908248	PKBM Karya Bakti	Gaden, Trucuk	Aktif				Belum
9	P9948575	PKBM Marsudi Kawruh	Ceper, Ceper	Tidak Aktif				Belum
10	P9934500	PKBM Mentari Kaya Arta	Jimus, Polanharjo	Aktif	A			
11	P9926282	PKBM Prima Sejahtera	Belang Wetan, Klaten Utara	Aktif		B		



NO	NPSN	Nama PKBM	Alamat	Status	Akreditasi			
					A	B	C	Belum
12	P9926278	PKBM Taruna Teladan	Juwiring, Juwiring	Aktif				Belum
13	P9926281	PKBM Usaha Mandiri	Bawukan, Kemalang	Aktif				Belum

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Klaten, 2024

Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota sebagaimana sesuai dengan SPM Pendidikan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, terdiri atas a) pendidikan anak usia dini, b) pendidikan dasar dan c) pendidikan kesetaraan.

Berdasarkan data dibawah ini, 3 indikator sampai dengan tahun 2024 sudah mencapai 100% sebagaimana target yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021.

Tabel 2.53
Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kabupaten Klaten
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	66,92	100	100	100	100
2	Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	91,71	100	100	100	100
3	Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	5,79	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dan Laporan SPM, 2024, diolah

Kemampuan literasi dan numerasi juga gambaran mutu pendidikan dari segi proses. Literasi adalah kemampuan bernalar menggunakan bahasa serta mampu menganalisa dan memahamai konsep, sedangkan numerasi adalah kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari.



Tabel 2.54
Kemampuan Literasi, Numerasi serta Nilai Karakter Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2024

No	Indikator	2023	2024	Perubahan Skor	Definisi Capaian
1	LITERASI SMP	71,51	78,37	Naik 6,86	Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca.
2	NUMERASI SMP	58,96	68,85	Naik 9,89	Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk numerasi
3	IKLIM KEAMANAN SMP	69,56	72,9	Naik 3,34	Satuan pendidikan memiliki lingkungan satuan pendidikan yang aman, terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkoba. Satuan pendidikan dapat mempertahankan kualitas warga satuan pendidikan dalam mencegah dan menangani kasus untuk menciptakan iklim keamanan di lingkungan satuan pendidikan.
4	IKLIM KEBINEKAAN SMP	69,01	75,79	Naik 6,78	Satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama/kepercayaan dan budaya, mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas, mendukung kesetaraan agama/kepercayaan dan budaya, serta memperkuat nasionalisme.
5	IKLIM INKLUSIVITAS SMP	56,32	61,09	Naik 4,77	Satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menyediakan layanan yang ramah bagi peserta didik dengan disabilitas dan cerdas berbakat istimewa.
6	LITERASI SD	58,67	66,31	Naik 7,64	Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca.
7	NUMERASI SD	44,17	51,35	Naik 7,18	Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk numerasi
8	IKLIM KEAMANAN SD	73,12	75,18	Naik 2,06	Satuan pendidikan memiliki lingkungan satuan pendidikan yang aman, terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkoba. Satuan pendidikan dapat mempertahankan kualitas warga satuan pendidikan dalam mencegah dan menangani kasus untuk menciptakan iklim keamanan di lingkungan satuan pendidikan.



No	Indikator	2023	2024	Perubahan Skor	Definisi Capaian
9	IKLIM KEBINEKAAN SD	75,39	72,06	Naik 3,33	Satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama/kepercayaan dan budaya, mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas, mendukung kesetaraan agama/ kepercayaan dan budaya, serta memperkuat nasionalisme.
10	IKLIM INKLUSIVITAS SD	57,42	58,09	Turun 0,67	Satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menyediakan layanan yang ramah bagi peserta didik dengan disabilitas dan cerdas berbakat istimewa.

Sumber : Rapot Mutu Pendidikan Tahun 2024

Keberhasilan proses pembelajaran tidak hanya diukur melalui kemampuan literasi dan numerasi siswa, namun juga nilai karakter siswa. Rapor Pendidikan juga telah memuat pengukuran nilai karakter siswa melalui 3 iklim yaitu iklim keamanan, kebhinekaan dan inklusivitas. Iklim keamanan menggambarkan kondisi satuan pendidikan dan proses pembelajaran yang terhindar dari perundungan, pelecehan seksual serta kekerasan. Iklim kebhinekaan merepresentasikan penerimaan terhadap perbedaan, kebebasan berpendapat, nalar kritis, kreativitas, sikap saling menghargai, toleransi, gotong royong serta ketaqwaan. Penerimaan terhadap siswa dari kelompok rentan seperti kurang mampu secara ekonomi dan disabilitas merupakan bagian dari perwujudan iklim.

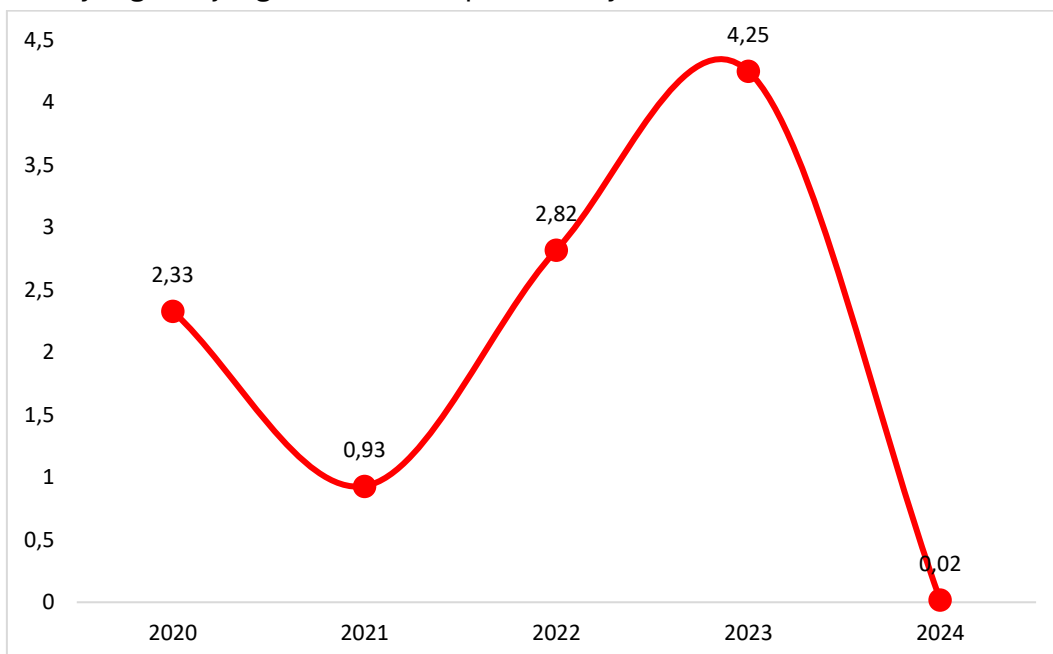
Tabel 2.55
Ringkasan Capaian Pendidikan Per Jenjang Kabupaten Klaten Tahun 2024

Jenjang	Capaian	Indikator Prioritas
PAUD	Capaian Terbaik	C.1 Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4
	Capaian Terendah	B.8 Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B
SD Umum	Peningkatan Tertinggi	C.1 Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4
	Capaian Terbaik	A.2 Kemampuan numerasi
	Capaian Terendah	A.1 Kemampuan literasi
SMP Umum	Peningkatan Tertinggi	A.2 Kemampuan numerasi
	Capaian Terbaik	A.2 Kemampuan numerasi
	Capaian Terendah	A.1 Kemampuan literasi

Sumber : Rapot Mutu Pendidikan Tahun 2024



Untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur, dibutuhkan bangsa yang cerdas sebagai fondasinya. Salah satu langkah nyata dalam mendukung upaya tersebut adalah peningkatan literasi masyarakat, yang tidak bisa dilepaskan dari peran penting perpustakaan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Perpustakaan daerah berfungsi sebagai pusat informasi, edukasi dan pengembangan budaya baca masyarakat. Pemanfaatannya menjadi indikator penting dalam menilai kesadaran literasi di suatu wilayah. Namun demikian, capaian pemanfaatan perpustakaan dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2019, tingkat pemanfaatan perpustakaan tercatat sebesar 2,33% angka ini menurun menjadi 0,39% pada tahun 2021 akibat terbatasnya akses layanan selama pandemi COVID-19 dan berkurangnya intensitas kunjungan langsung. Selanjutnya terjadi peningkatan pada tahun 2020 sebesar 2,82% dan kembali naik di tahun 2023 mencapai 4,25%. Namun pada tahun 2024 persentase pemanfaatan perpustakaan tercatat menurun bukan karena penurunan kunjungan melainkan adanya perbedaan metode perhitungan yang digunakan dibandingkan tahun tahun sebelumnya, tercatat sebesar 0,02% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya literasi dan akses terhadap sumber informasi yang berkualitas. Oleh karena itu, penguatan peran perpustakaan daerah perlu terus didorong, baik melalui peningkatan layanan, digitalisasi koleksi, maupun program-program literasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.



Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Klaten 2024

Gambar 2.63 Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024



Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Klaten hingga tahun 2024 tercatat sebanyak 67.714 orang, meningkat 10.423 orang dibandingkan tahun 2023. Peningkatan ini didukung oleh beragam inovasi layanan perpustakaan, termasuk peluncuran Mobil Buku Anak Keliling "Mbak Marsini". Hingga akhir 2024, seluruh layanan perpustakaan telah beroperasi optimal, antara lain:

1. Jambu Carlin (Pinjam Buku Cara Online);
2. Bejanaku (Bus Jemput Anak Sekolah Baca Buku);
3. Pocadi (Pojok Baca Buku Digital) di Mall Pelayanan Publik;
4. Perpustakaan Car Free Day dan layanan perpustakaan keliling.

Sebagai inovasi layanan berbasis digital, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga meluncurkan Kartu Tanda Anggota Perpustakaan Berbasis NIK (Kanda Pusta Berindu) yang terintegrasi dengan Dinas Dukcapil. Program ini memungkinkan anggota perpustakaan daerah otomatis terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Nasional. Selain itu, layanan digital juga diperkuat melalui aplikasi I-Klaten yang menyediakan koleksi e-book dan dapat diakses melalui Playstore oleh anggota e-pustaka.

Jumlah koleksi buku tahun 2024 mencapai 52.511 eksemplar, meningkat 1.134 eksemplar dari tahun sebelumnya, dengan 39.178 judul buku dan didukung oleh 5 pustakawan. Terkait pengembangan perpustakaan desa, hingga 2024 telah dilakukan pembinaan terhadap 156 perpustakaan desandari total 391 desa. Pembinaan ini terus dilakukan setiap tahun guna mendorong pemerataan akses literasi di seluruh wilayah Kabupaten Klaten.

Tabel 2.56
Data terkait Kepustakaan di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang/ Pengunjung	70.878	11.811	35.434	57.291	67.714
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eksemplar	49.786	50.156	50.745	51.377	52.511
Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/ tahun	Orang/ Pengunjung	55.154	55.154	51.867	51.785	48.626
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Eksemplar	37.457	37.673	38.009	38.348	39.178
Jumlah pengunjung perpustakaan per hari	Orang/ Pengunjung	194	32	97	157	185

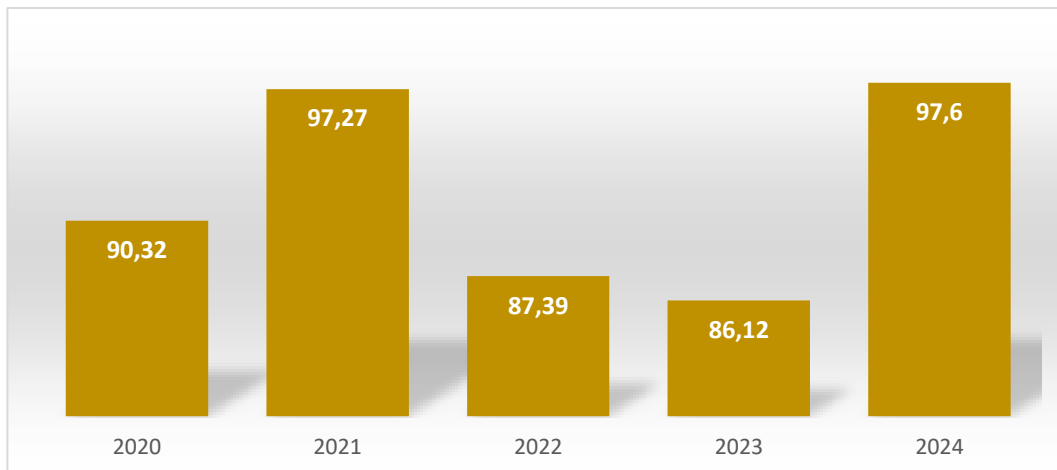
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Klaten 2024



2.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Pengentasan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menjadi salah satu fokus pembangunan di Kabupaten Klaten. Meskipun program perlindungan sosial yang dilaksanakan belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan PPKS, capaian positif mulai terlihat. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah PPKS yang menerima bantuan, termasuk melalui program pemberdayaan seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Dukungan lintas sektor, khususnya dari pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat, sangat penting untuk menekan angka PPKS secara berkelanjutan.

Penanganan PPKS di Kabupaten Klaten menunjukkan kemajuan signifikan dalam dua tahun terakhir. Pada 2023, sebanyak 86,12% PPKS telah menerima bantuan dan meningkat tajam menjadi 97,6% pada 2024. Capaian ini mencerminkan optimalisasi upaya pemerintah daerah dalam menjangkau kelompok rentan dan memperkuat program pemberdayaan. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan pemerintah pusat, daerah, serta partisipasi aktif masyarakat. Sinergi lintas sektor dan pendekatan berkelanjutan menjadi kunci terciptanya layanan sosial yang inklusif dan adaptif.



Sumber: Dinas Sosial P3AKB Kab. Klaten 2024

Gambar 2.64 PPKS yang Memperoleh Bantuan Tahun 2020–2024

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial di Indonesia. PSKS mencakup perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang memiliki kapasitas serta kemauan untuk berperan aktif dalam menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Keberadaan PSKS sangat strategis sebagai mitra pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial, khususnya di luar panti rehabilitasi sosial.

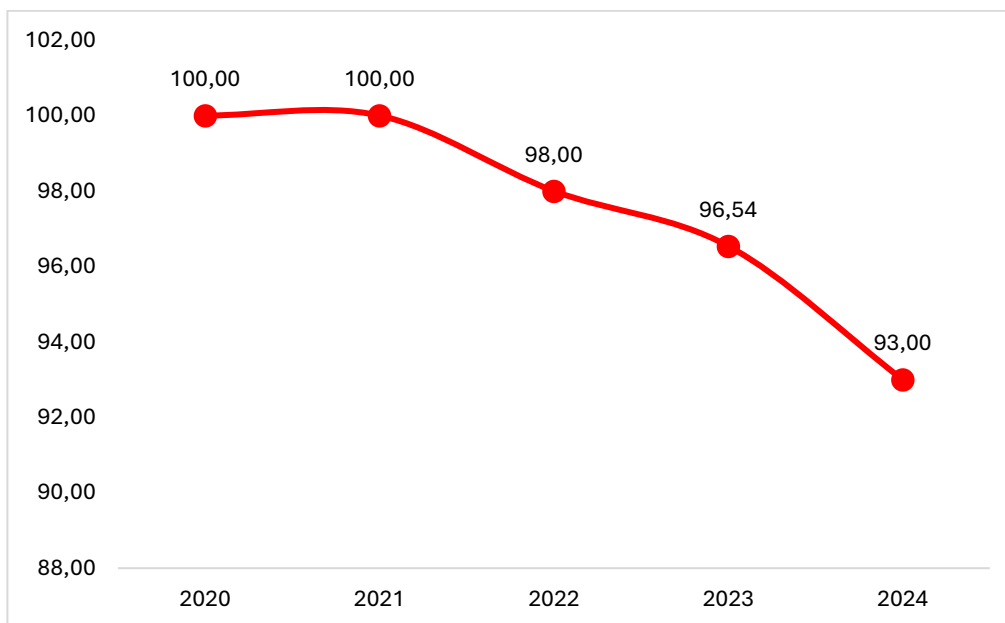
Pelaksanaan pelayanan sosial oleh PSKS terbagi dalam dua kategori, yaitu berbasis lembaga dan non-lembaga. Keduanya berperan dalam



menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap kelompok-kelompok rentan, seperti anak, lansia, penyandang disabilitas dan kelompok marginal lainnya. Selain itu, PSKS juga berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program sosial, pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kemandirian serta kualitas hidup.

Capaian kinerja PSKS pada tahun 2020, tercatat mencapai 100%, yang menunjukkan optimalnya peran serta dan dukungan dari para pelaku PSKS dalam mendukung agenda kesejahteraan sosial, kondisi ini menurun pada tahun 2024, menjadi 93,00%. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama, baik dari segi pendanaan, koordinasi antar pihak, kapasitas kelembagaan, maupun dampak dari kondisi sosial ekonomi yang turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Diperlukan langkah-langkah penguatan kapasitas, peningkatan sinergi lintas sektor dan dukungan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan peran PSKS agar mereka dapat berkontribusi lebih optimal dalam menjawab tantangan sosial yang terus berkembang.

Dengan memperkuat peran PSKS, diharapkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan dapat terus diwujudkan, serta menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian dan dukungan.



Gambar 2.65 Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Lembaga dan Non Lembaga yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Pemerintah Kabupaten Klaten juga melakukan upaya perlindungan bagi penyandang disabilitas, tahun 2024 terdapat 1.431 penyandang disabilitas dengan beragam disabilitas yang ada, setelah dilakukan verifikasi dan validasi



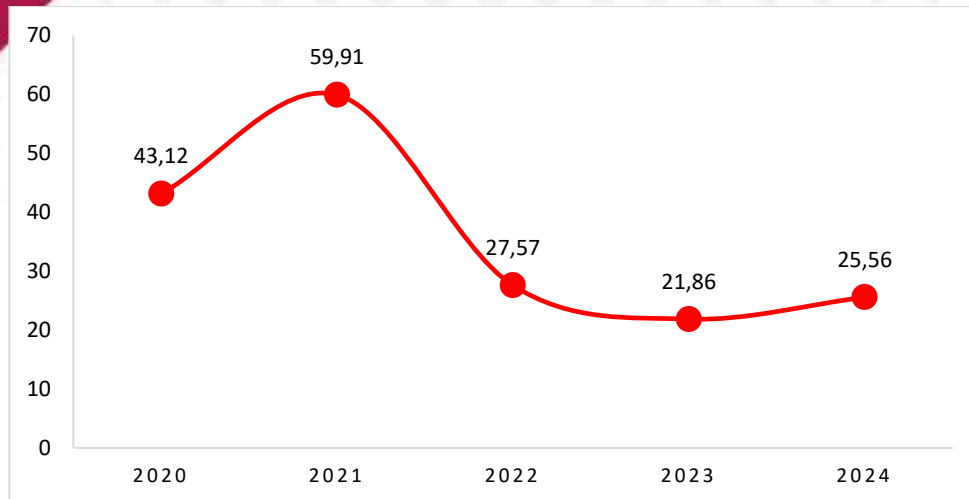
data jumlah ini turun apabila dibandingkan dengan jumlah penyandang disabilitas di tahun 2023 yang tercatat sebanyak 4.953. Upaya penanganan dan perlindungan bagi penyandang disabilitas dilakukan dalam bentuk pembinaan, pelatihan dan pemberdayaan bagi yang memerlukan pelayanan disabilitas. Penanganan bagi yang memerlukan pelayanan disabilitas pun dapat berupa bantuan sosial bagi pemerlu pelayanan disabilitas berat.

Tabel 2.57
Pelaksanaan SPM Urusan Sosial Kabupaten Klaten Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp 000)		
		Target	Realisasi	Capaian	APBD	Realisasi	Capaian
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	173	173	100	592.088.000	493.624.457	83,3
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	440	440	100	888.132.000	740.436.685	83,3
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	850	850	100	1.184.176.000	987.248.914	83,3
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti	135	135	100	296.044.000	246.812.228	83,3
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	178	178	100	433.258.000	7.415.744	1,7

Sumber: Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Klaten, 2024

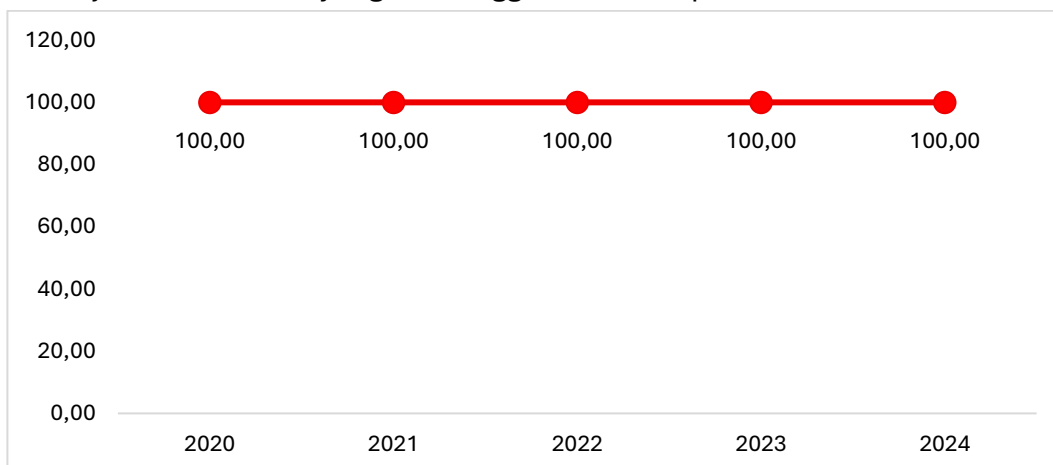
Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, serta PP No. 44 Tahun 2015 jo. PP No. 82 Tahun 2019, setiap pemberi kerja dengan minimal 10 pekerja atau yang membayar upah minimal Rp1.000.000 wajib mengikutsertakan pekerjaanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Iuran dibayarkan bersama oleh perusahaan dan karyawan melalui pemotongan gaji. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) merupakan hak perlindungan sosial bagi seluruh pekerja dan berfungsi seperti asuransi dalam mengalihkan risiko kerja. Tingkat kepesertaan pekerja di Kabupaten Klaten dalam program Jamsostek menunjukkan tren fluktuatif. Pada 2020 sebesar 43,12%, meningkat menjadi 59,91% di 2021, namun menurun signifikan menjadi 25,56% pada 2024. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban jaminan sosial ketenagakerjaan.



Sumber: Disperinaker Kab. Klaten 2024

Gambar 2.66 Besaran Pekerja/ Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Selama kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Klaten menunjukkan tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Hal ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan seluruh program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan, baik dari sisi output, waktu pelaksanaan, maupun pemanfaatannya oleh masyarakat. Capaian ini tidak terlepas dari sinergi antara perangkat daerah, dukungan kebijakan yang konsisten, serta partisipasi aktif masyarakat dan mitra pembangunan lainnya. Capaian ini diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, dengan fokus pada kualitas layanan, inovasi program, serta perluasan jangkauan agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari program kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.



Gambar 2.67 Tingkat Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024



2.2.5. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju

Pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan merupakan fondasi penting bagi masyarakat Kabupaten Klaten dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Kedua nilai tersebut berkontribusi besar terhadap kelancaran pembangunan daerah di berbagai bidang. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk terus menumbuhkan kesadaran dalam merawat nilai-nilai luhur Pancasila serta menguatkan karakter kebangsaan.

Kesadaran ini berdampak luas, termasuk dalam menanggulangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, mencegah perilaku koruptif, mengatasi konflik sosial, serta menekan potensi intoleransi dan radikalisme. Di Kabupaten Klaten, pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan telah menunjukkan hasil positif, tercermin dari tingginya tingkat kerukunan, toleransi, saling menghormati dan kepedulian sosial. Hal ini diperkuat melalui hasil survei Indeks Toleransi dan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) yang berada dalam kategori baik, serta capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang tergolong kategori sedang.

IPMas sendiri merupakan indikator penting untuk mengukur kondisi sosial budaya masyarakat dan digunakan sebagai tolok ukur capaian pembangunan masyarakat. Sejak tahun 2022, Kabupaten Klaten telah menghitung IPMas secara berkala, dengan tiga dimensi utama: Gotong Royong, Toleransi dan Rasa Aman. Data diperoleh melalui survei langsung kepada masyarakat, guna menghasilkan potret sosial yang representatif.

Pada tahun 2023, hasil IPMas menunjukkan capaian sebagai berikut:

- **Indeks Toleransi:** 0,341 (tertinggi),
- **Indeks Gotong Royong:** 0,341,
- **Indeks Rasa Aman:** 0,219 (terendah).

Capaian ini menggambarkan bahwa meskipun nilai-nilai toleransi dan gotong royong sudah cukup kuat, aspek rasa aman masih perlu mendapatkan perhatian khusus dalam intervensi kebijakan pembangunan sosial di Kabupaten Klaten. Adapun capaian Indeks per komponen perhitungan IPMas sebagai berikut.



Sumber: Bapperida Kabupaten Klaten, 2024

Gambar 2.68 Nilai Indeks Komponen Perhitungan IPMas Kabupaten Klaten Tahun 2022-2024

Nilai IPMas di Tahun 2022 sebesar 0,711, terjadi penurunan pada tahun 2023 menjadi 0,697 penurunan terjadi dikarenakan responden yang disasar pada tahun 2023 hanya mengarah pada generasi muda (Gen Z) pada tingkat pelajar dan mahasiswa sehingga kurang representatif. Di tahun 2024 telah dilakukan perluasan sasaran survey ke Ketua/ Pengurus RT/ RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, pemuda, Relawan Kebencanaan dan pengurus organisasi kemasyarakatan lainnya sehingga terjadi peningkatan nilai IPMas menjadi 0,823 di tahun 2024. Nilai interval 0,823 berdasarkan kualitas masyarakat masuk pada nilai dengan kategori Sangat Baik (A).



Sumber : Bapperida Kabupaten Klaten, 2024

Gambar 2.69 Nilai Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kabupaten Klaten Tahun 2022-2024

Pemahaman dan pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila, wawasan kebangsaan, serta semangat kebudayaan merupakan fondasi penting dalam



mewujudkan masyarakat Kabupaten Klaten yang berkarakter, berdaya saing dan berkepribadian. Dalam konteks pembangunan daerah, nilai-nilai tersebut berperan sebagai pengikat persatuan, perekat sosial, sekaligus penggerak pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan pada jati diri dan kearifan lokal masyarakat.

Upaya pemajuan kebudayaan masih menghadapi tantangan. Pada tahun 2023, persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang berhasil dilestarikan baru mencapai 10,09%, menunjukkan bahwa masih banyak potensi budaya yang belum terinventarisasi maupun dikelola dengan baik. Selain itu, partisipasi kelompok kesenian dalam kegiatan pertunjukan budaya juga masih tergolong rendah, yakni sebesar 19,29% kelompok kesenian yang aktif tampil atau menyelenggarakan kegiatan kesenian dalam satu tahun terakhir.

Selain peningkatan dalam penyelenggaraan kegiatan, jumlah karya budaya yang diakui secara resmi juga mengalami perkembangan. Sebanyak 13 karya budaya mendapat penetapan dari Kementerian Hukum dan HAM dan satu karya budaya direvitalisasi melalui media film berjudul *Anusapati*. Pada tahun yang sama, dua karya budaya dari Kabupaten Klaten, yakni Payung Juwiring dan Putaran Miring Gerabah Melikan, ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Pemerintah daerah juga mulai membangun kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka melestarikan budaya lokal melalui penyelenggaraan event bersama.

Di bidang pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya, jumlah yang dilestarikan meningkat dari 169 pada tahun sebelumnya menjadi 197 lokasi pada tahun 2024. Selain itu, berdasarkan berita acara serah terima dari Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCP) Jawa Tengah pada tahun 2020, Kabupaten Klaten menerima limpahan pengelolaan terhadap empat situs cagar budaya serta 130 objek yang diduga sebagai cagar budaya. Seluruh objek tersebut kini dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan disimpan di Museum Daerah Kabupaten Klaten. Jumlah objek cagar budaya yang dikelola juga meningkat secara signifikan pada tahun 2024.

Upaya Pemerintah Kabupaten Klaten dalam memajukan kebudayaan menunjukkan hasil yang positif melalui peningkatan kegiatan seni budaya, pengakuan terhadap karya budaya lokal, serta pelestarian situs dan objek cagar budaya. Ini menandakan komitmen yang kuat untuk menjaga warisan budaya sebagai bagian dari identitas daerah sekaligus sebagai daya tarik pariwisata yang potensial. Selengkapnya perkembangan indikator Seni Budaya Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.58
Perkembangan Indikator Seni Budaya Kabupaten Klaten
Tahun 2020-2024

Indikator Seni Budaya	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Event	7	1	5	40	53
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Lokasi	132	149	159	169	197
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Karya	1	1	14	22	22
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Situs	3	3	3	3	3
Jumlah event yang dilaksanakan dengan pihak lain	Event	0	2	8	9	6
Jumlah Pembinaan Sanggar seni	kegiatan	0	10	10	47	4
Jumlah Situs Cagar Budaya yang di Kelola Dinas	Situs	0	4	4	4	4
Jumlah Objek Cagar budaya yang di Kelola Dinas	Objek	0	26	87	87	130
Jumlah Warisan Budaya tak Benda yang ditetapkan	Sertifikat	0	2	4	4	5

Kabupaten Klaten memiliki keuntungan geografis karena terletak diantara Kota Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan pusat perpaduan peradaban antar zaman. Beberapa tahun terakhir ini terdapat peningkatan penemuan benda, situs dan kawasan cagar budaya di Kabupaten Klaten sehingga perlu diupayakan untuk pelestariannya. Sebagai langkah pelestarian benda cagar budaya, pada tahun 2021 telah dilakukan penetapan Monumen Juang 45 Klaten sesuai dengan SK Bupati Klaten Nomor 430/280 Tahun 2021 sebagai Taman Budaya yang didalamnya terdapat museum sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk memwadahi pelaku seni (seniman) dalam berkarya dan melaksanakan kegiatan seni budaya serta sebagai tempat penyimpanan, memamerkan dan memberikan edukasi tentang sejarah perkembangan peradaban di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.59
Jumlah Sarana dan Prasana Penyelenggaraan Seni Budaya
Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Penetapan Taman Budaya	Lokasi	0	1	0	0	1
Museum Daerah	Lokasi	0	1	0	0	1

Sumber : Dinas Pariwisata. Kebudayaan. Pemuda dan Olahraga, 2024

Kabupaten Klaten yang banyak melahirkan pelaku seni yang bervariasi dan tersebar seluruh wilayah Kabupaten, diantaranya dari bidang seni Lukis, Seni



Karawitan, Seni Pedalangan, Seni Tari dan Seni Teater. Data kelompok kesenian tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.60
Data Kelompok Kesenian Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Seni Tari Klasik	Grup	6	6	6	6	6
Seni Tari Tradisional	Grup	7	8	8	8	8
Seni Kreasi Baru	Grup	5	5	5	5	5
Seni Tari Modern	Grup	1	1	1	1	1
Seni Patung	Grup	2	2	2	2	2
Seni Lukis	Grup	3	3	3	3	3
Seni Pedalangan	Grup	1	1	1	1	1
Seni Musik Tradisional	Grup	1	1	1	1	1
Seni Karawitan	Grup	24	24	24	24	24
Seni Ketoprak	Grup	10	10	10	10	10
Seni Teater	Grup	1	1	1	1	1
Seni Reog Ponorogo	Grup	0	0	17	17	17

Sumber : Dinas Pariwisata. Kebudayaan. Pemuda dan Olahraga, 2024

Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan. Objek Pemajuan Kebudayaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.61
Data Objek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tradisi Lisan	Grup	42	42	42	42	42
Manuskrip	Grup	27	27	27	27	27
Ritus	Grup	9	9	9	9	9
Pengetahuan Tradisional	Grup	16	16	16	16	16
Teknologi Tradisional	Grup	3	3	3	3	3
Seni	Grup	9	9	9	9	9
Bahasa	Grup	2	2	2	2	2
Permainan Rakyat	Grup	6	6	6	6	6
Olahraga Tradisional	Grup	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Pariwisata. Kebudayaan. Pemuda dan Olahraga, 2024

2.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

Untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga di gunakan indikator iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga). iBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui



ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. Penghitungan atau pengukuran iBangga dapat diklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40. iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40-70. iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.

Tabel 2.62
Perkembangan Capaian Pembangunan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	angka	N/A	57,02	59,06	65,61	66,13
Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	angka	61,8	63	65,5	69,4	65,3

Sumber: Dinas Sosial. P3AKB Kab. Klaten, 2023

Untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas, maka perlu dilakukan melalui pengendalian angka kelahiran. Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu strategi untuk mengurangi kematian ibu khususnya ibu dengan kondisi 4T, terlalu muda melahirkan (di bawah usia 20 tahun), terlalu sering melahirkan, terlalu dekat jarak melahirkan dan terlalu tua melahirkan (di atas usia 35 tahun). Selain itu, program KB juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Selain itu, KB juga merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan ketahanan keluarga, kesehatan dan keselamatan ibu, anak, serta perempuan.

Peserta KB aktif tahun 2024 sebesar 66,55% meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yaitu sebesar 65,88%, yaitu meningkat sebesar 0,67%. Hal ini didorong oleh berbagai intervensi program dan edukasi terhadap semua pihak yang mendukung terlaksananya program Keluarga Berencana.

Gambaran peserta KB baru dan KB Aktif di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.63
Peserta KB dan KB Aktif di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Tahun	PUS	Peserta KB baru		Peserta KB Aktif	
		Jumlah	%	Jumlah	%
2020	195.133	12.348	6,33	138.344	70,94
2021	197.321	13.550	5,15	138.719	70,30
2022	188.158	10.392	5,52	124.337	66,09



Tahun	PUS	Peserta KB baru		Peserta KB Aktif	
		Jumlah	%	Jumlah	%
2023	176.543	6.751	3,82	116.309	65,88
2024	177.337	N/A	N/A	118.024	66,55

Sumber: Dinas Sosial. P3AKB Kab. Klaten, 2024

Laju Pertumbuhan Penduduk rata-rata per tahun dari tahun 2020-2024 fluktuatif karena ada aktivitas konsolidasi bersih data kependudukan di tahun 2021, LPP di tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 0,27%. Sedangkan rata-rata TFR baru tersedia data sampai dengan tahun 2024 yaitu sebesar 1,91, anak per pasangan usia subur ini merupakan capaian yang baik, menandakan bahwa rata-rata tiap keluarga memiliki 1 s/d 2 anak. Untuk Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed) belum mengalami penurunan yang berarti positif yaitu semakin kecil peserta KB yang drop out atau keluar dari peserta KB, serta adanya KIE dan pendampingan dari kader kepada PUS yang belum ber-KB. Untuk Rasio petugas pembantu pembina KB desa (PPKBD) bersifat tetap yaitu terdapat 1 orang PPKB di setiap desa.

Tabel 2.64
Capaian Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	0,54	-4,08	0,80	0,78	0,27
Total Fertility Rate (TFR)	Anak per usia subur	2,10	1,60	2,08	1,95	1,91
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	%	70,9	70,30	65,14	65,88	66,55
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	16,95	16,97	17,87	12,54	8,32
Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100

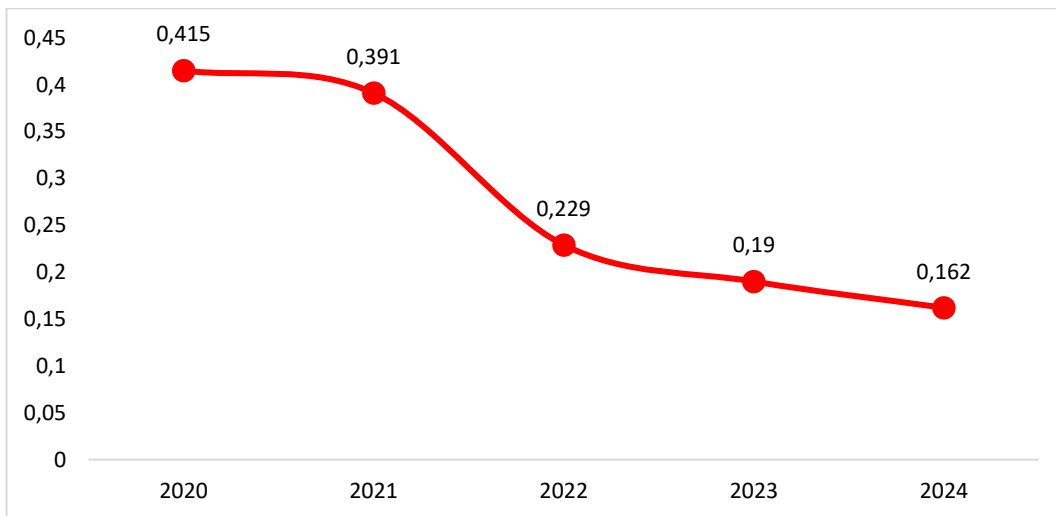
Sumber : Dinas Sosial. P3AKB Kab. Klaten, 2023.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) sebagai salah satu indikator nasional untuk mengukur perkembangan pencapaian kesetaraan gender di Indonesia. Indeks Ketimpangan Gender juga akan dapat memperlihatkan potensi capaian pembangunan manusia yang hilang akibat adanya kesenjangan gender dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja sehingga dapat lebih jauh memahami tingkat keberhasilan seseorang yang dibatasi oleh



ketimpangan gender. Melalui pemahaman konsep dan cara penghitungan IKG tersebut, diharapkan akan dapat memperkuat upaya tata kelola pemerintahan yang lebih baik untuk mewujudkan kesetaraan gender dan membangun masyarakat yang inklusif di Indonesia.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Klaten pada tahun 2020–2024 menunjukkan tren penurunan. Nilai IKG pada tahun 2020 tercatat sebesar 0,415 dan terus menurun hingga mencapai 0,162 pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa ketimpangan gender di Kabupaten Klaten semakin berkurang, yang berarti akses dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi semakin setara.

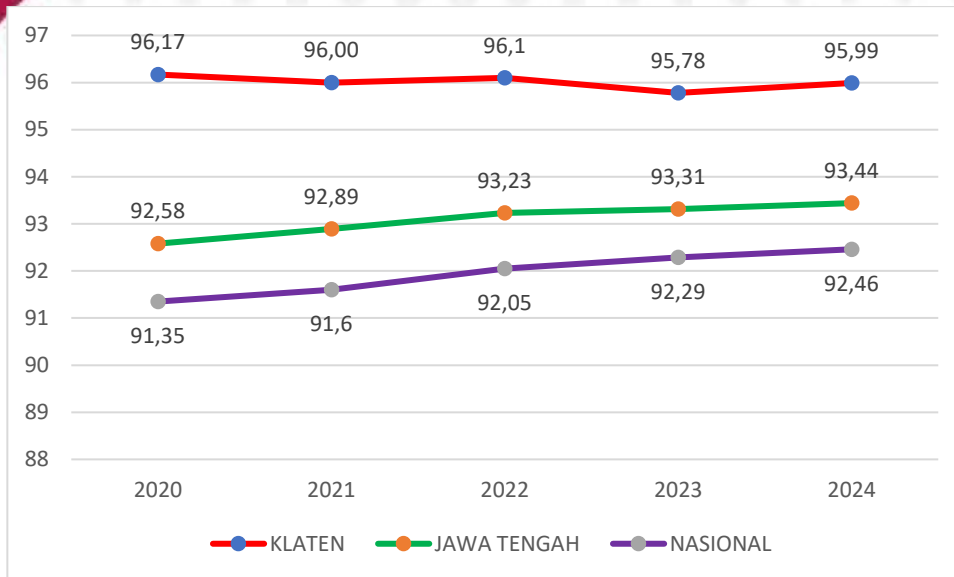


Sumber: BPS Jawa tengah, 2024

Gambar 2.70 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Sejalan dengan itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) juga menjadi indikator penting dalam mengukur kesetaraan gender, khususnya dalam hal akses terhadap sumber daya pembangunan. IPG disusun dari komponen kesehatan, pendidikan dan hidup layak sama halnya dengan IPM. Umur harapan hidup mewakili dimensi kesehatan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mewakili dimensi pengetahuan, serta pengeluaran per kapita mewakili dimensi ekonomi yang disajikan menurut jenis kelamin. Dengan kata lain, dinamika IPG dari waktu ke waktu sangat dipengaruhi oleh perubahan dari tiga komponen tersebut. IPG disusun dari komponen kesehatan, pendidikan dan hidup layak sama halnya dengan IPM.

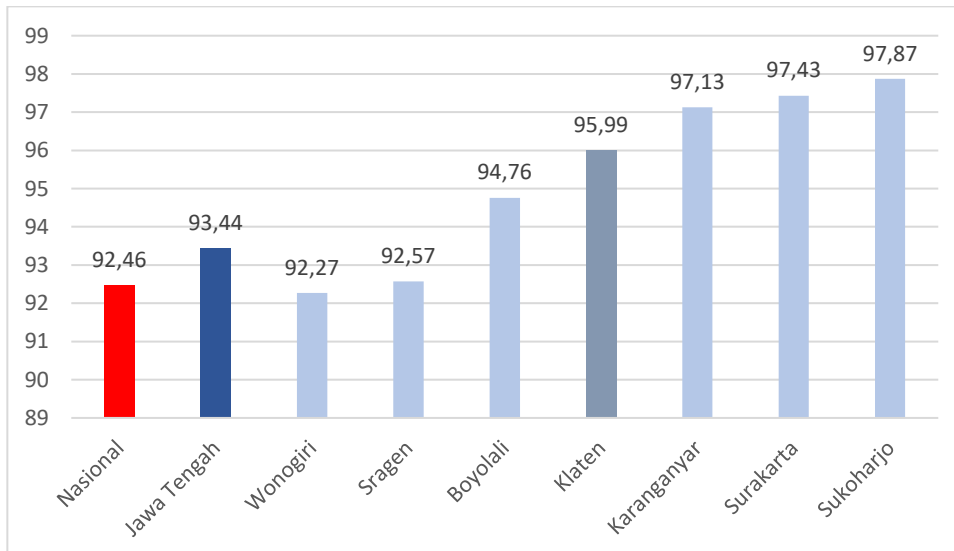
Sejak tahun 2020 hingga 2023, nilai IPG Kabupaten Klaten cenderung menurun. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 96,17 dan menurun menjadi 95,78 pada tahun 2023. Namun pada tahun 2024 IPG mulai mengalami peningkatan yakni naik menjadi 95,99 atau meningkat sebesar 0,11 poin dibanding tahun sebelumnya.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.71 Perkembangan IPG Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota di wilayah Subosukawonosraten, IPG Kabupaten Klaten pada tahun 2024 berada diperingkat 4 rendah, diurutkan teratas ditempati Kabupaten Sukoharjo, disusul Kabupaten Karanganyar, diikuti Kota Surakarta, selanjutnya Kabupaten Klaten. Jika disandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, capaian IPG Kabupaten Klaten pada tahun 2024 masih lebih baik berada diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

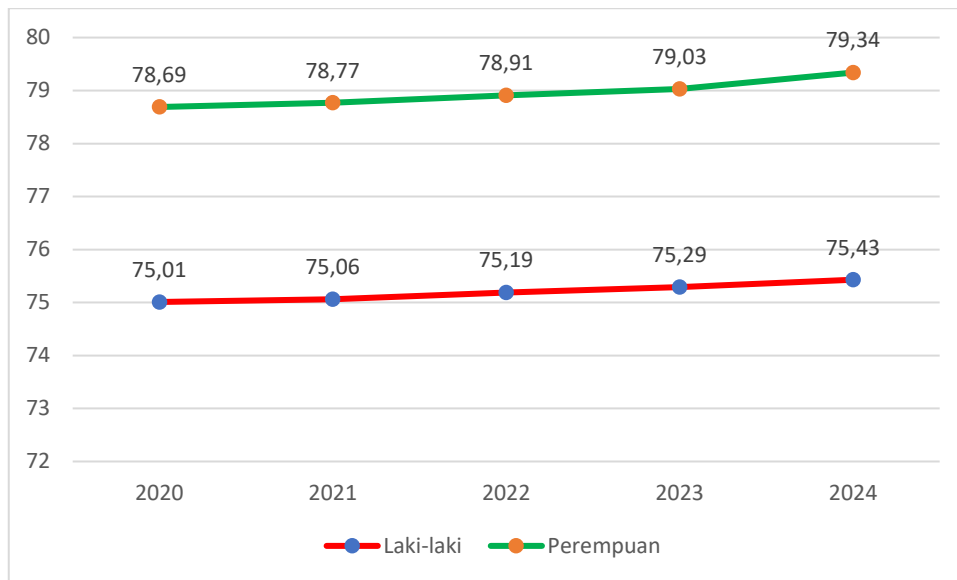
Gambar 2.72 Posisi Relatif IPG Kabupaten Klaten dengan Kabupaten/Kota lainnya di Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2024



Gambaran komponen pembentuk IPG Kabupaten Klaten terdiri dari Umur Harapan Hidup mewakili dimensi kesehatan, Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah mewakili dimensi pengetahuan, serta Pengeluaran per Kapita mewakili dimensi ekonomi yang disajikan menurut jenis kelamin secara lengkap dapat dijabarkan berikut ini.

1) Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup menurut jenis kelamin tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. UHH laki-laki lebih rendah dibandingkan UHH perempuan. pada tahun 2024 UHH Perempuan di Kabupaten Klaten telah mencapai 79,34 tahun, sementara laki-laki mencapai 75,43 tahun. Nilai UHH perempuan dan laki-laki setiap tahunnya mengalami peningkatan yang berarti, indikasi tingkat kesejahteraan dan Pembangunan perempuan dan laki-laki mengalami perbaikan.

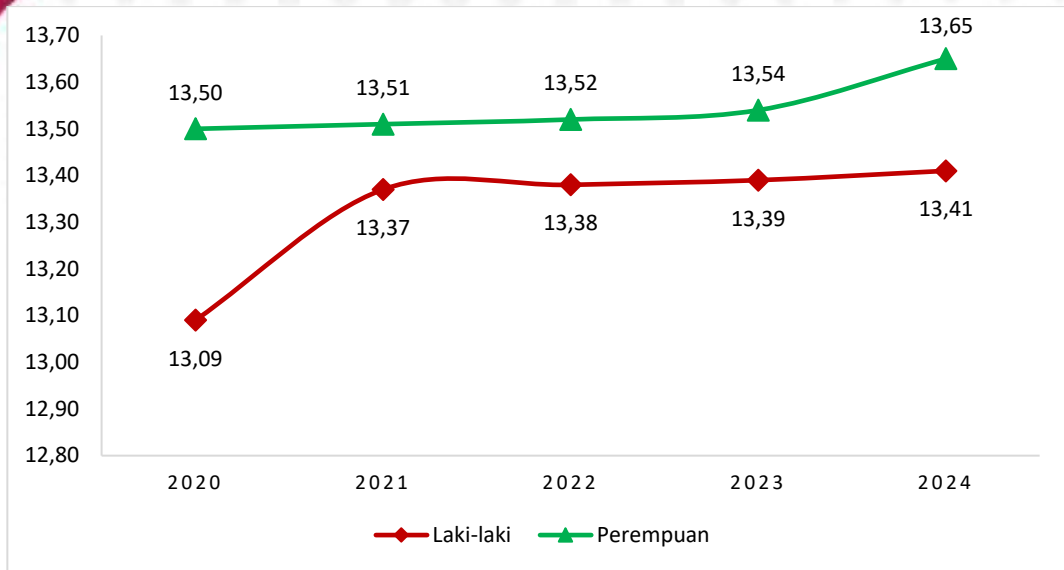


Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.73 Perkembangan Umur Harapan Hidup Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

2) Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan lama sekolah berdasarkan jenis kelamin Kabupaten Klaten masing-masing menunjukkan peningkatan. HLS Laki-laki lebih rendah dibanding HLS perempuan. Pada tahun 2024 HLS perempuan adalah 13,65 tahun dan laki-laki sebesar 13,41 tahun. Dengan nilai pencapaian yang relatif hampir sama, mengindikasikan bahwa kesetaraan pembangunan dalam aspek pendidikan dapat diwujudkan secara merata dalam waktu yang tidak lama.

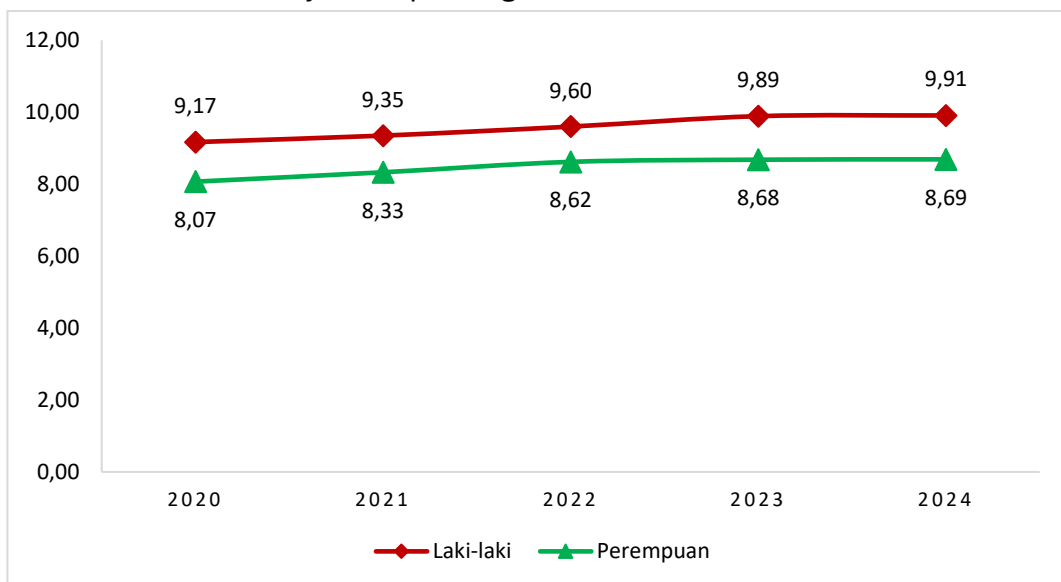


Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.74 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

3) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Klaten masing-masing mengalami peningkatan. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Klaten tahun 2024 untuk laki-laki sekitar 1 tahun lebih lama dibandingkan perempuan yaitu laki laki adalah sekitar 9,91 tahun sedangkan perempuan 8,69 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perempuan di atas 25 tahun bersekolah hanya sampai tingkat SMP kelas 2.



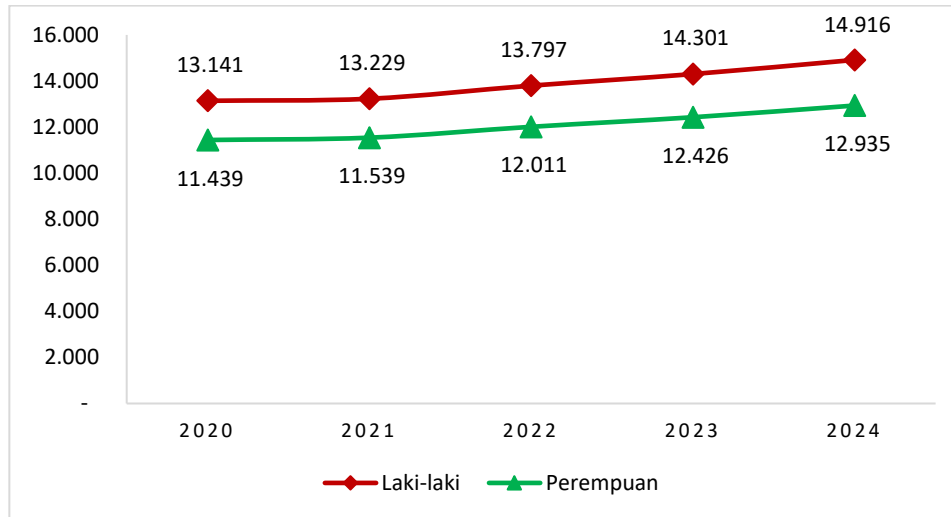
Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.75 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024



4) Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan Kabupaten Klaten berdasarkan jenis kelamin masing-masing mengalami kenaikan pada tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2024, pengeluaran per kapita perempuan sebesar Rp12.935, jauh di bawah laki-laki sebesar Rp14.916. Rendahnya capaian perempuan dalam ekonomi salah satunya dipengaruhi oleh keterbatasan perempuan dalam memasuki pasar tenaga kerja di lapangan usaha tertentu yang lebih banyak membutuhkan tenaga kerja laki-laki.

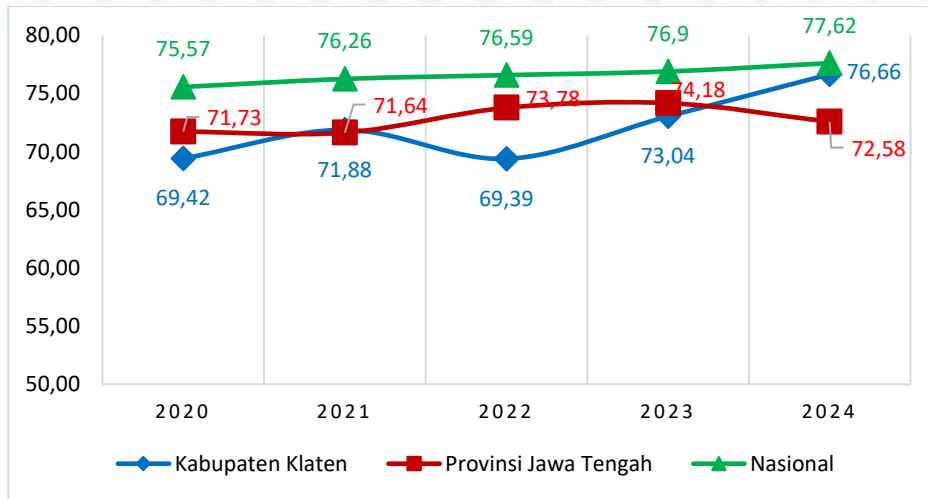


Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.76 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur sejauh mana keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga kebutuhan dan permasalahannya dapat mempengaruhi serta teraktualisasi dalam hasil keputusan kebijakan pembangunan yang menyangkut kepentingan perempuan baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

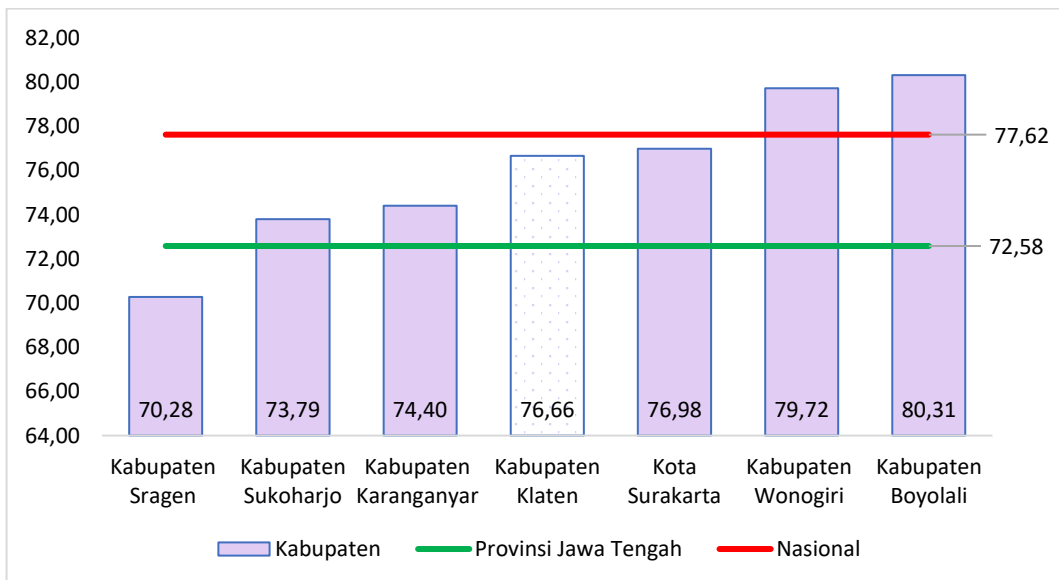
Capaian IDG di Kabupaten Klaten pada tahun 2020–2024 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020, nilainya sebesar 71,73%, kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai 74,18% pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 72,58%. Penurunan ini dipengaruhi oleh masih terbatasnya keterwakilan perempuan dalam posisi strategis di lembaga pemerintahan dan pengambilan keputusan, serta tantangan sosial-budaya yang membatasi partisipasi aktif perempuan dalam ranah publik dan politik.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.77 Perkembangan IDG Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Klaten pada tahun 2024 menempati peringkat tinggi keempat jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di wilayah Subosukawonosraten. Peringkat pertama ditempati oleh Kabupaten Boyolali, disusul oleh Kabupaten Wonogiri di posisi kedua dan Kota Surakarta di posisi ketiga. Capaian IDG Kabupaten Klaten juga berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah, namun masih di bawah rata-rata nasional, yang menunjukkan bahwa pemberdayaan gender di Kabupaten Klaten sudah cukup baik, namun masih memiliki ruang untuk ditingkatkan agar setara dengan capaian nasional.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

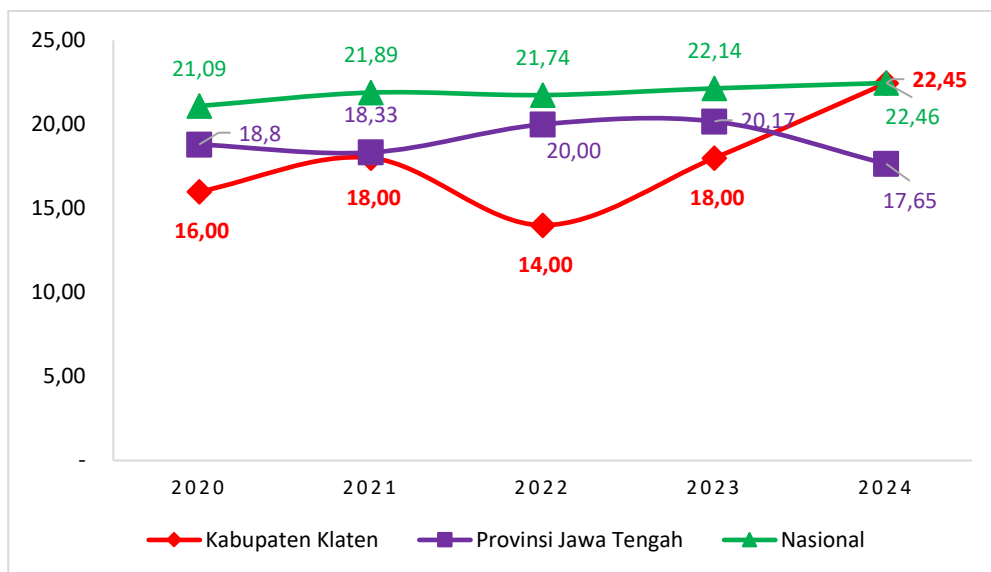
Gambar 2.78 Posisi Relatif IDG Kabupaten Klaten dengan Kabupaten/Kota lainnya di Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2024



IDG merupakan indikator yang dapat memperlihatkan peningkatan kualitas perempuan di suatu wilayah. Indikator komposit IDG terdiri dari keterlibatan perempuan di parlemen, Perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Gambaran indikator pembentuk IDG Kabupaten Klaten secara lengkap dijabarkan berikut ini.

1) Keterlibatan Perempuan di Parlemen

Keterlibatan perempuan di Kabupaten Klaten pada tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren fluktuatif cenderung meningkat. Pada tahun 2020 capaiannya sebesar 16,00%, kemudian meningkat menjadi 18,00% pada tahun 2021. Pada tahun 2022 sempat menurun menjadi 14,00%, sebelum kembali meningkat secara signifikan pada tahun 2024 menjadi 22,45%. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam berbagai bidang, termasuk pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan, semakin diperhatikan dan mendapat ruang yang lebih luas seiring meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya kesetaraan gender.



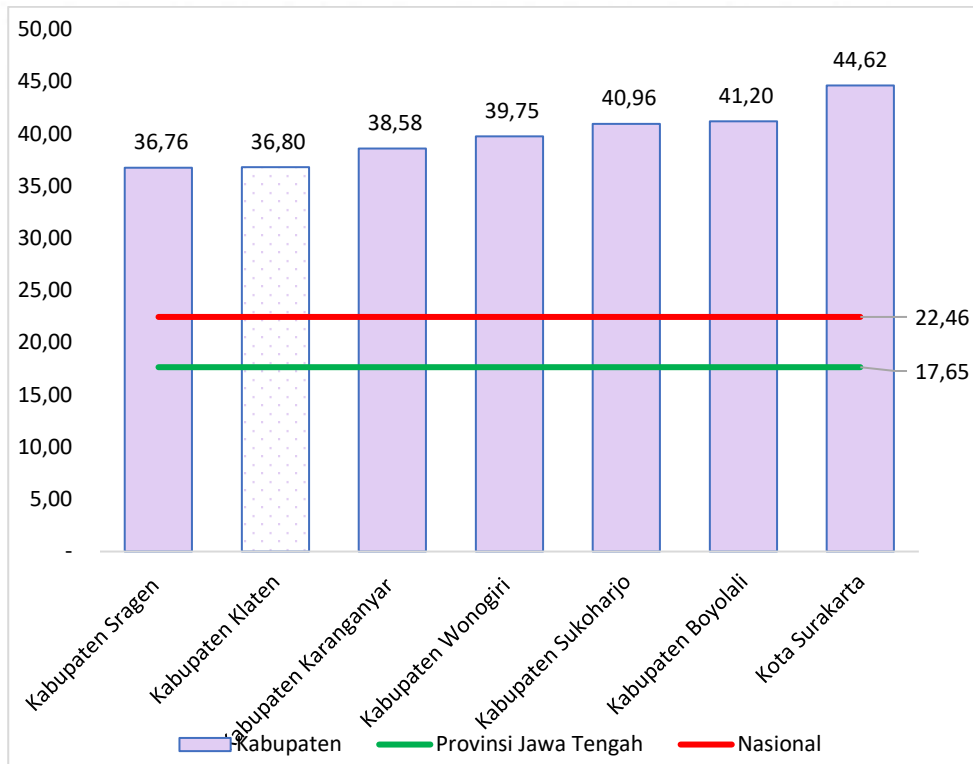
Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.79 Perkembangan Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Jika dilihat berdasarkan posisi relatif keterlibatan perempuan di parlemen se-wilayah Subosukawonosraten pada tahun 2024, Kabupaten Klaten menempati peringkat terendah kedua, setelah Kabupaten Sragen yang mencatat keterlibatan perempuan paling rendah, yaitu sebesar 36,80%. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan rata-rata Nasional, keterlibatan perempuan di parlemen



Kabupaten Klaten pada tahun 2024 justru berada di atas kedua rata-rata tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara regional masih rendah, secara lebih luas keterlibatan perempuan di Klaten sudah menunjukkan kemajuan yang positif dalam konteks perwakilan politik.

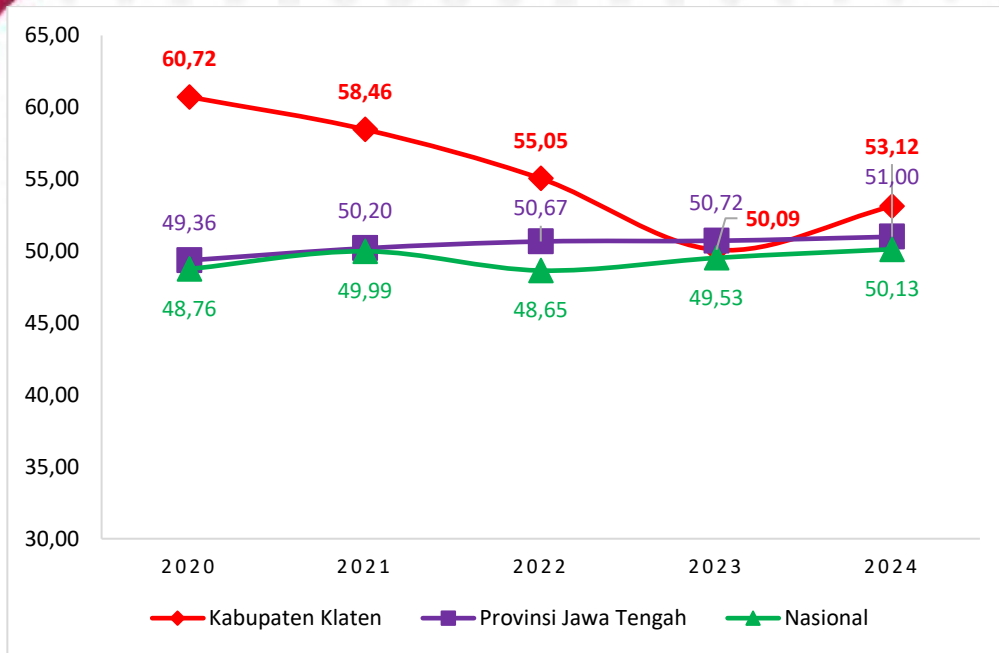


Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.80 Posisi Relatif Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kabupaten Klaten dengan Kabupaten/Kota lainnya di wilayah Subosukawonosraten Tahun 2024

2) Perempuan sebagai tenaga Profesional

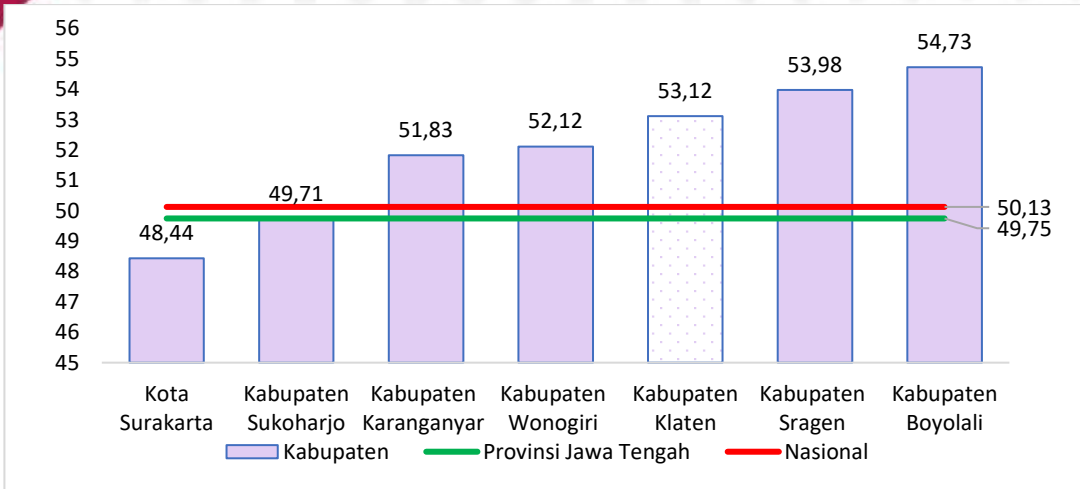
Keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional di Kabupaten Klaten pada tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2020, mencapai 60,72%, namun mengalami penurunan bertahap hingga pada tahun 2023 sebesar 50,00%. Pada tahun 2024, terjadi sedikit peningkatan menjadi 53,12%. Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun perempuan masih mendominasi di sektor profesional, namun kestabilan partisipasinya belum sepenuhnya terjaga dan memerlukan dukungan kebijakan yang berkelanjutan untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan perempuan dalam dunia kerja profesional.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.81 Perkembangan Perempuan sebagai Tenaga Profesional Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Jika dilihat berdasarkan posisi relatif perempuan sebagai tenaga profesional di wilayah Subosukawonosraten pada tahun 2024, Kabupaten Klaten menempati peringkat ketiga tertinggi dengan capaian sebesar 53,12%, setelah Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sragen. Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional, persentase perempuan sebagai tenaga profesional di Kabupaten Klaten berada di bawah rata-rata provinsi, namun masih di atas rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masih ada ruang untuk peningkatan di tingkat provinsi, Kabupaten Klaten telah menunjukkan kinerja yang cukup baik secara nasional dalam memberdayakan perempuan di sektor profesional.

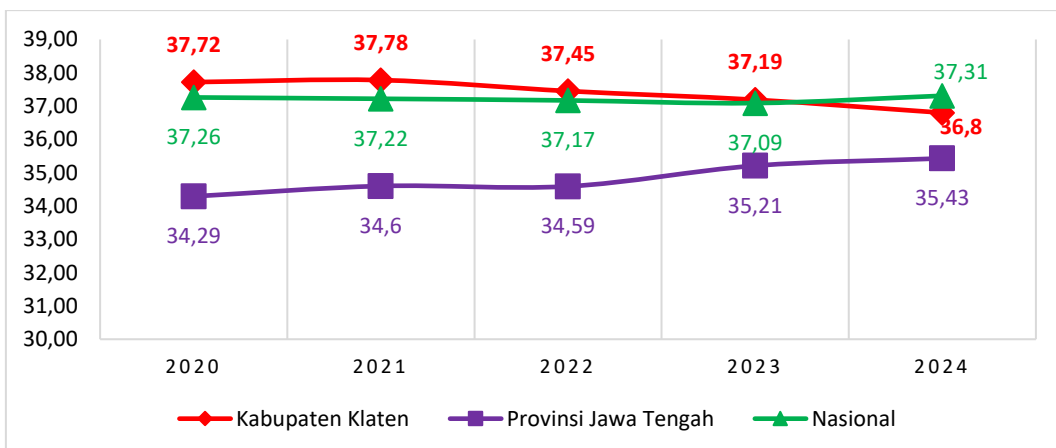


Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.82 Posisi Relatif Perempuan sebagai Tenaga Profesional Kabupaten Klaten dengan Kabupaten/Kota lainnya wilayah Subosukawonosraten Tahun 2024

3) Sumbangan Pendapatan Perempuan

Sumbangan pendapatan perempuan di Kabupaten Klaten selama periode 2020–2024 menunjukkan tren penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, kontribusi pendapatan perempuan tercatat sebesar 37,72% dan menurun menjadi 36,80% pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan masih adanya tantangan dalam meningkatkan peran dan kontribusi ekonomi perempuan, baik dari segi akses terhadap pekerjaan yang layak, peluang usaha, maupun tingkat upah yang setara dengan laki-laki. Diperlukan strategi yang lebih inklusif untuk mendorong kemandirian ekonomi perempuan dan memperkuat peran mereka dalam pembangunan daerah.

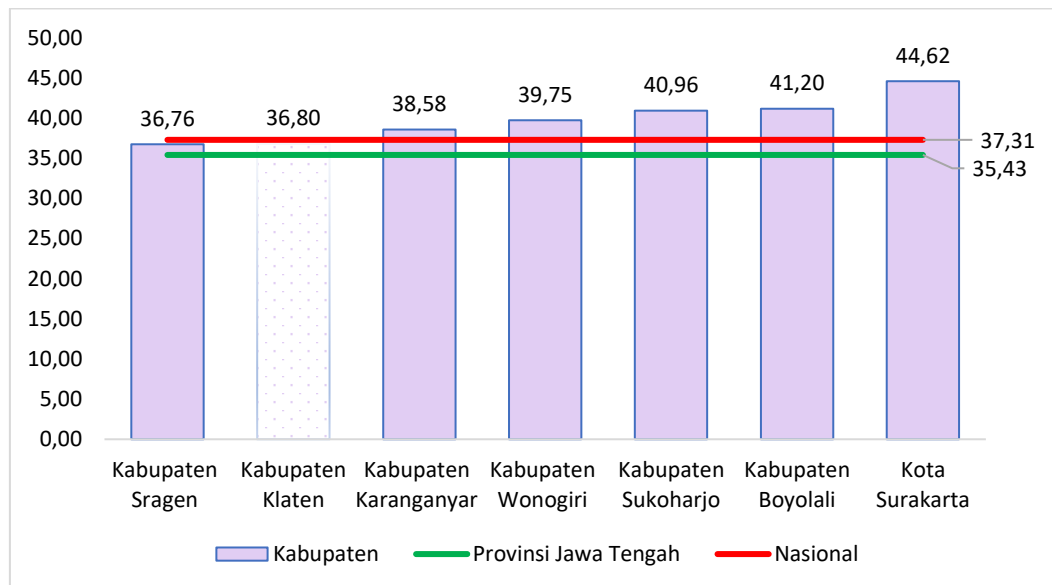


Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.83 Perkembangan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024



Jika dilihat berdasarkan posisi relatif sumbangan pendapatan perempuan di wilayah Subosukawonosraten pada tahun 2024, Kabupaten Klaten menempati peringkat terendah kedua, setelah Kabupaten Sragen yang memiliki sumbangan paling rendah. Sumbangan pendapatan perempuan di Kabupaten Klaten juga tercatat berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan di bawah rata-rata nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi perempuan di Kabupaten Klaten masih perlu ditingkatkan melalui perluasan akses terhadap lapangan kerja, pelatihan keterampilan, dukungan kewirausahaan, serta kebijakan yang mendorong kesetaraan dalam pendapatan antara laki-laki dan perempuan.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

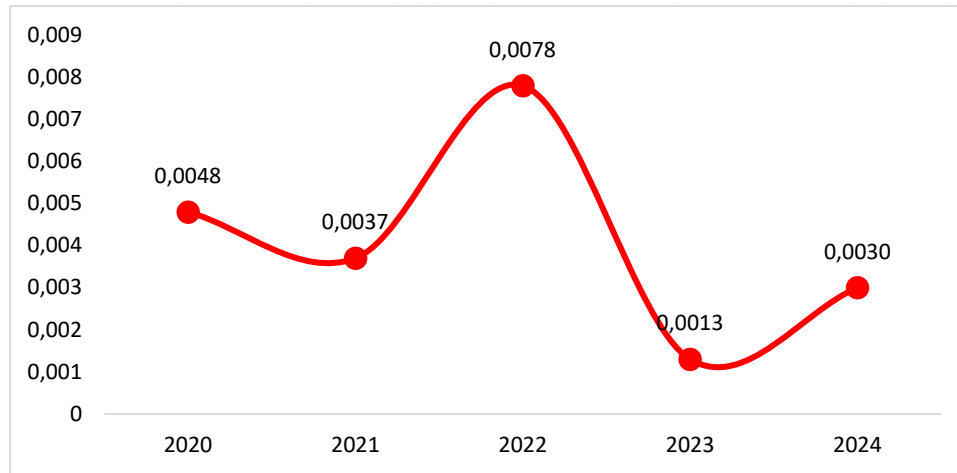
Gambar 2.84 Posisi Relatif Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kabupaten Klaten dengan Kabupaten/Kota lainnya di wilayah Subosukawonosraten Tahun 2024

Salah satu indikator yang dapat mencerminkan kondisi ketahanan keluarga dan perlindungan terhadap kelompok rentan adalah rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pada periode 2020-2024 rasio KDRT menunjukkan fluktuatif. Pada tahun 2020 rasio tercatat sebesar 0,0048, kemudian sedikit menurun pada tahun 2021 menjadi 0,0037, selanjutnya pada tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 0,0078 dan selanjutnya menurun tajam pada tahun 2023 menjadi 0,0013, namun pada tahun 2024 terjadi peningkatan menjadi 0,0030.

Oleh karena itu, upaya preventif dan responsif terhadap kekerasan harus terus ditingkatkan melalui kebijakan yang berpihak pada korban, penguatan sistem perlindungan sosial, serta pemberdayaan keluarga untuk menciptakan lingkungan yang aman, setara dan mendukung perkembangan setiap anggotanya. Dengan demikian, ketangguhan keluarga akan



terbangundan kualitas sumber daya manusia pun akan meningkat, mendorong terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.



Sumber : Dinsos P3AKB Kabupaten Klaten 2024

Gambar 2.85 Rasio KDRT Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak terus ditingkatkan, yang ditunjukkan dengan meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan berbasis gender dan anak. Pada tahun 2024, tercatat bahwa kasus kekerasan yang paling banyak didampingi dan terlayani adalah kekerasan seksual sebanyak 10 kasus, disusul oleh bentuk kekerasan lainnya sebanyak 9 kasus. Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, kekerasan tertinggi terjadi pada kelompok usia 13–17 tahun dengan total 12 bentuk kekerasan yang dilaporkan. Oleh karena itu, penguatan sistem perlindungan sosial, edukasi keluarga dan pemberdayaan masyarakat harus terus dilakukan agar keluarga mampu menjadi lingkungan yang aman, adil dan mendukung perkembangan seluruh anggotanya. Dengan memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan kesadaran gender dan membangun masyarakat yang inklusif, maka akan tercipta sumber daya manusia yang berkualitas sebagai fondasi utama pembangunan yang berkelanjutan.

**Tabel 2.65
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2024**

Rentang Usia	Jenis Kelamin	Bentuk Kekerasa							Jumlah
		Fisik	Psikis	Seksual	Eksplotasi	Trafficking	Penelantaran	Lainnya	
0-5 tahun	laki-laki	0	0	0	0	0	1	0	2
	perempuan	0	0	0	0	0	0	1	
6-12 tahun	laki-laki	0	0	0	0	0	1	3	8
	perempuan	0	0	3	0	0	0	1	
13-17 tahun	laki-laki	0	0	2	0	0	0	1	12
	perempuan	0	0	5	0	0	1	3	
Jumlah		0	0	10	0	0	3	9	22

Sumber : Dissosp3appkb Kabupaten Klaten, 2024



Peran pemuda dalam pembangunan Kabupaten Klaten tercermin melalui meningkatnya jumlah wirausaha muda serta keaktifan dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan. Pada 2024, persentase wirausaha muda pemula mencapai 24%, naik dari 23% pada 2023. Kenaikan ini didorong oleh bertambahnya peserta pelatihan kewirausahaan. Wirausaha muda diharapkan berkontribusi dalam menekan pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui kreativitas dan inovasi.

Partisipasi organisasi pemuda juga menunjukkan perkembangan positif. Pada 2024, tingkat organisasi yang aktif mencapai 81%, meskipun persentase OKP yang aktif secara kelembagaan masih 17% menurut data KNPI, yang menjadi induk organisasi kepemudaan.

Di bidang olahraga, pembinaan dilakukan melalui kerja sama antara Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan klub dan organisasi masyarakat. Hingga 2024, terdapat 45 cabang olahraga yang dibina, melibatkan 269 atlet muda dari berbagai ajang seperti POPDA Karesidenan, POPDA Provinsi, PEPARPEDA, Bocce, PON dan PEPARNAS. Sebanyak 77 pelatih dari 31 cabor telah tersertifikasi dan 122 atlet berhasil meraih total 154 prestasi. Perkembangan indikator yang termasuk kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.66
Perkembangan Indikator Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	76	81	81	81	81
Persentase Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang aktif	OKP	19	17	17	17	17
Persentase wirausaha muda pemula	%	19	20	22	23	24
Cakupan pembinaan olahraga	Cabor	36	39	42	42	42
Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Orang	80	64	64	77	77
Cakupan pembinaan atlet muda	Orang	330	89	148	175	260
Jumlah atlet berprestasi	Orang	211	24	15	127	122
Jumlah prestasi olahraga	Orang	0	14	15	192	154
Tingkat prestasi pemuda dan olahraga	%	0	56,5	56,38	37,25	49

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2024

Beberapa Organisasi Kepemudaan dan Keolahragaan yang ada di Kabupaten Klaten meliputi:

1. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI),
2. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda,
3. Organisasi Pemuda Partai Politik,
4. Organisasi Kemahasiswaan,
5. Praja Muda Karana (Pramuka),
6. Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) tingkat SLTA,
7. Karang Taruna,



8. Organisasi Pemuda Kedaerahan,
9. Organisasi Pemuda Profesi,
10. Perkumpulan Pemuda di bidang Seni,
11. Pemuda Pencinta Alam,
12. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI),
13. National Paralympic Committee Indonesia (NPCI),
14. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI)
15. Ikatan Guru Olahraga Nasional (IGORNAS)

Organisasi Kepemudaan yang bernaung di Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga adalah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Klaten. KNPI merupakan wadah penyalur aspirasi dari organisasi-organisasi kepemudaan dalam upaya meningkatkan taraf hidup serta meningkatkan persatuan dan kesatuan nasional. Sedangkan organisasi kepemudaan yang masuk dalam wadah KNPI Kabupaten Klaten sampai dengan saat ini yaitu:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. GP Anshor, | 9. Pemuda LDII, |
| 2. Fatayat NU, | 10. Pemuda Katolik, |
| 3. IPNU | 11. Pemuda Gereja, |
| 4. IPPNU, | 12. Orang Muda Katolik, |
| 5. Nasyiatul Aisyiyah, | 13. Pemuda Hindu, |
| 6. Pemuda Muhammadiyah, | 14. Pemuda Pancasila, |
| 7. Ikatan Pelajar Muhammadiyah, | 15. Pemuda Panca Marga, |
| 8. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah: | 16. Patria Buddis, |
| | 17. FKPPi. |

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

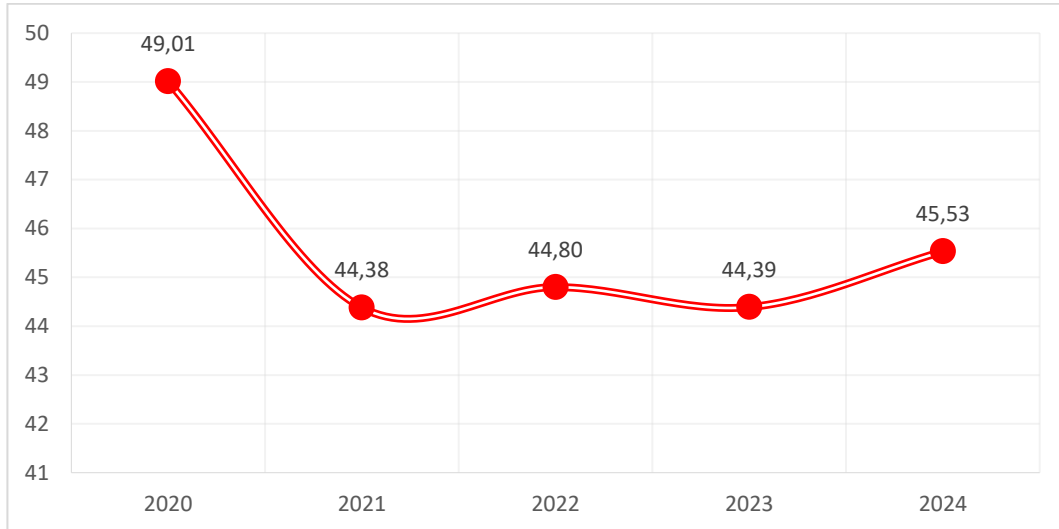
2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing daerah merupakan faktor kunci dalam menggerakkan perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di Kabupaten Klaten, daya saing sumber daya manusia (SDM) memainkan peranan yang sangat penting, karena kualitas SDM yang unggul dapat mendorong perkembangan sektor-sektor strategis dan meningkatkan ketahanan ekonomi daerah. Dalam upaya meningkatkan daya saing ini, perhatian terhadap faktor-faktor demografis juga menjadi sangat relevan, salah satunya adalah Angka Beban Ketergantungan (Dependency Ratio).

Pada tahun 2024, Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) Klaten sebesar 45,53%, dengan kata lain setiap 100 penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) harus menanggung sebanyak 45 hingga 46 orang penduduk yang tidak produktif (usia di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun). Terlihat bahwa pada



tahun 2024 penduduk usia kerja di Klaten masih dibebani tanggung jawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua. Secara keseluruhan, selama kurun waktu 2020-2024 rasio ketergantungan Kabupaten Klaten mengalami penurunan mulai dari tahun 2020 sebesar 49,01% menurun menjadi 45,53% ditahun 2024.



Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2024

Gambar 2.86 Perkembangan Rasio Ketergantungan di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha ini dikelompokkan menjadi 5 sektor lapangan usaha. Dari kelima lapangan pekerjaan tersebut, industri pengolahan dan perdagangan yang menyerap pekerja terbanyak. Sementara, pertanian menempati urutan ketiga, selanjutnya jasa kemasyarakatan dan lapangan usaha lainnya. Pada tahun 2022 lapangan pekerjaan industri pengolahan mengalami penurunan menjadi 33,01% dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu dari 34,80%. Selain itu, sektor perdagangan juga mengalami penurunan dari 31,19% menjadi 30,81% pada tahun 2022. Dari semua sektor usaha yang mengalami peningkatan adalah jasa kemasyarakatan dari 11,36% pada tahun 2021 menjadi 13,22% pada tahun 2022.

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha ini dikelompokkan menjadi 5 sektor lapangan usaha yaitu pertanian (pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan), industri pengolahan (pertambangan dan penggalian, industri pengolahan dan konstruksi), perdagangan (perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel), jasa kemasyarakatan (transportasi dan pergudangan, jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, jasa pendidikan serta jasa kesehatan) dan lainnya.

Dari kelima lapangan pekerjaan tersebut, industri pengolahan dan perdagangan yang menyerap pekerja terbanyak. Sementara, pertanian menempati urutan ketiga, selanjutnya jasa kemasyarakatan dan lapangan usaha



lainnya. Pada tahun 2022 lapangan pekerjaan industri pengolahan mengalami penurunan menjadi 33,01% tahun dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu dari 34,80%. Selain itu, sektor perdagangan juga mengalami penurunan dari 31,19% menjadi 30,81% pada tahun 2022. Dari semua sektor usaha yang mengalami peningkatan adalah jasa kemasyarakatan dari 11,36% pada tahun 2021 menjadi 13,22% pada tahun 2022.

Tabel 2.67
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Kelompok Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

Lapangan Pekerjaan	Tahun Ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian	18,93	17,03	18,01	17,16	N/A
Industri Pengolahan	24,72	34,80	33,01	34,82	N/A
Perdagangan	29,42	31,19	30,81	-	-
Jasa	12,81	11,63	13,22	48,03	N/A
Lainnya	14,12	5,35	4,82	-	-

Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2023

Perkembangan status pekerjaan selama periode 2018-2022 mengalami fluktuasi selama lima terakhir. Status pekerjaan buruh/karyawan dan pekerja bebas cukup tinggi di tahun 2018 sebesar 52,15%, terus menurun hingga menjadi 47,81% di tahun 2020. Kemudian kembali meningkat ke angka 53,28% di tahun 2021 dan 50,43% di tahun 2022. Penduduk yang berusaha sendiri di tahun 2018 yaitu sebesar 21,35%, lalu terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 menjadi 23,86%. Namun, pada tahun 2021 kembali turun menjadi 22,94% dan pada tahun 2022 kembali naik menjadi 23,90%.

Tabel 2.68
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Tahun 2020-2024

Status Pekerjaan	Tahun Ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024
Berusaha Sendiri	23,86	22,94	23,90	28,99	N/A
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	14,37	11,52	11,85	8,86	N/A
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	3,17	2,75	2,19	2,85	N/A
Buruh/ karyawan dan pekerja bebas	36,92	39,6	37,59	45,80	N/A
Pekerja Bebas Pertanian	2,74	5,1	8,83	2,28	N/A
Pekerja Bebas Non Pertanian	8,15	8,58	4,01	3,72	N/A
Pekerja keluarga	10,8	9,5	11,63	7,49	N/A

Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2023



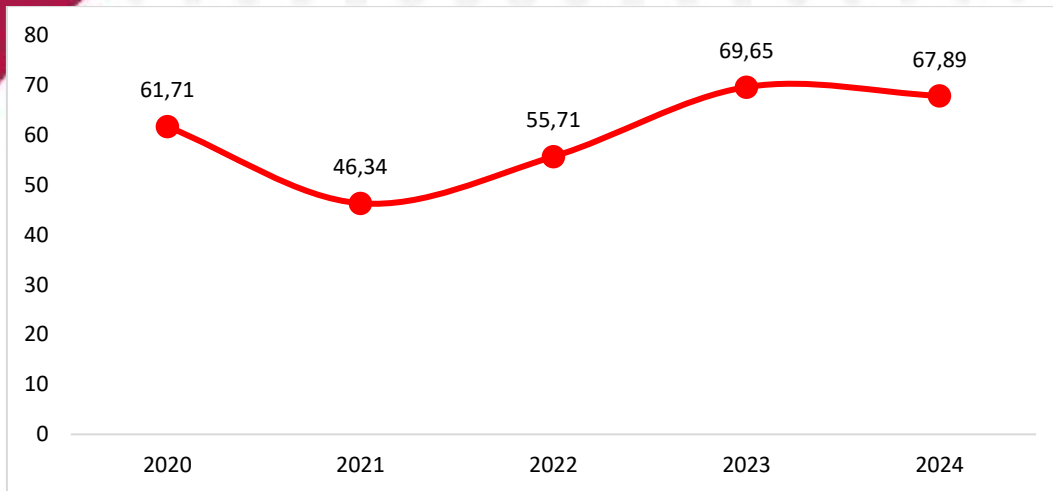
2.3.2. IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

Penyelenggaraan inovasi daerah memiliki peran strategis dalam mendorong percepatan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui tiga pilar utama, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat, serta penguatan daya saing daerah. Inovasi tidak hanya menjadi instrumen pelengkap, melainkan pendorong utama dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang responsif, efisien dan adaptif terhadap perubahan.

Penyelenggaraan Inovasi Daerah Kabupaten Klaten dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan sasaran mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: (a) peningkatan Pelayanan Publik, (b) pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan (c) peningkatan daya saing daerah. Inovasi Daerah dilaksanakan mendasari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/Insentif Inovasi Daerah. Penyelenggaraan inovasi daerah di Kabupaten Klaten pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan untuk indikator tujuan indeks Inovasi daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui penyelenggaraan Indeks Inovasi Daerah (IID).

IID Kabupaten Klaten mengalami fluktuatif selama periode 2020-2024. Pada Tahun 2020 capaiannya sebesar 61,71%, mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar ditahun 2021 sebesar 46,34%. Hal ini disebabkan oleh masuknya Pandemi wabah Covid Corona dan adanya kebijakan Pemerintah tentang PSBB (pembatasan Sosial Berskala Besar). Selanjutnya untuk tahun 2022, Tahun 2023 tingkat capaian indek inovasi mengalami pertumbuhan seiring dengan berkurangnya Wabah Covid-19 dan mulai dibukanya kembali kegiatan di berbagai bidang.

Tahun 2024 capaian indeks Inovasi mengalami penurunan kembali sebesar 1,76%, dari 69,65% pada tahun 2023 turun menjadi 67,89% di tahun 2024. Pada tahun 2024 Kabupaten Klaten menyusun dan mengirimkan 218 Inovasi ke Kemendagri, namun nilai tingkat kematangan inovasinya relatif lebih kecil dibandingkan pada tahun 2023, dikarenakan tidak dapat memenuhi semua isian indikator penilaian.



Sumber: Bapperida Kab. Klaten, 2024

Gambar 2.87 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Perkembangan penerapan atau implementasi inovasi di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan dan masuk dalam kategori Sangat tinggi (>90%). Perkembangan ini mencapai puncaknya di tahun 2024 dengan target 90% inovasi yang diterapkan tercapai 90,85% yang artinya target terpenuhi 100%.

Perkembangan persentase pemanfaatan hasil kelitbangan di tahun 2020-2024 menunjukkan angka fluktuatif dengan rata-rata lebih dari 60% hasil kajian/penelitian telah diimplementasikan atau dimanfaatkan sebagai masukan penyusunan kebijakan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah period 2021-2026. Sedangkan Capaian pertumbuhan inovasi perangkat daerah selama tahun 2020 s/d tahun 2024 mengalami pertumbuhan yang melambat dikarenakan banyak inovasi yang sudah tidak layak untuk diterapkan kembali. Perlu upaya keras untuk meningkatkan persentase pemanfaatan hasil penelitian salah satunya dengan meningkatkan kualitas hasil penelitian dengan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian/perguruan tinggi yang berkompeten. Sedangkan untuk meningkatkan pertumbuhan inovasi diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan Perangkat Daerah untuk selalu berinovasi dengan tujuan mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Tabel 2.69

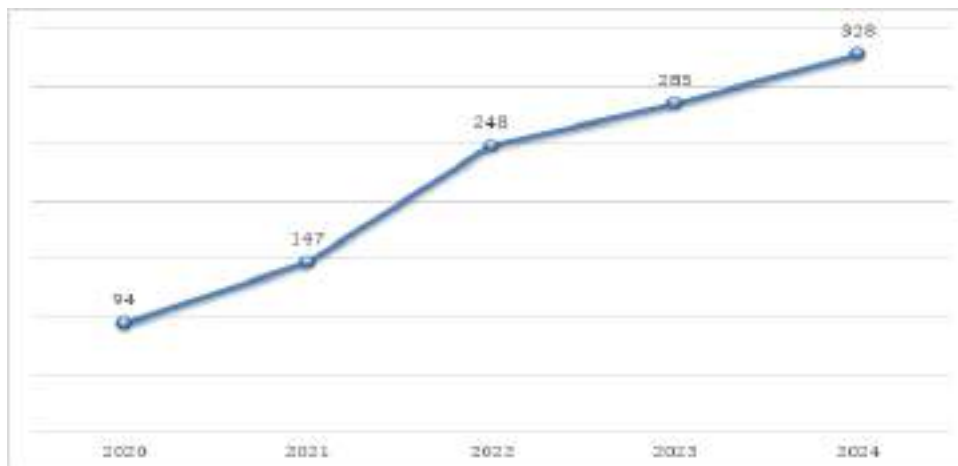
Capaian Indikator Kinerja Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	53,85	66,67	58,33	54,50	65
Pertumbuhan inovasi perangkat daerah	%	10,59	56,38	68,71	14,92	15,09

Sumber: Bapperida Kab. Klaten, 2024



Peningkatan inovasi yang cukup signifikan di lima tahun terakhir. Hal ini dikarenakan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang begitu banyak, perangkat daerah perlu menyusun strategi dengan mengedepankan inovasi dan mendayagunakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptekin) dalam rangka peningkatan kualitas layanan maupun peningkatan kinerja perangkat daerah. Di samping itu selama 2 (dua) tahun berturut-turut Pemerintah Kabupaten Klaten telah melaksanakan Klaten Inovasi Award (KIA), sebagai penghargaan kepada OPD, Masyarakat, akademisi dan Insan Inovator di Kabupaten Klaten. Dengan adanya penilaian dan pemberian penghargaan inovasi daerah telah memotivasi daerah untuk berlomba-lomba melakukan inovasi baik inovasi di bidang tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik maupun inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Tujuan akhir daripada inovasi ini adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.



Sumber: Bapperida Kab. Klaten, 2024

Gambar 2.88 Inovasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Kemampuan ekonomi suatu daerah merupakan fondasi penting dalam mendorong daya saing daerah yang berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan daerah, kapasitas ekonomi tidak hanya diukur dari besar kecilnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga dari seberapa besar ekonomi daerah tersebut mampu menciptakan daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku usaha, investor, serta tenaga kerja untuk hadir, berkembang dan berkontribusi dalam kegiatan ekonomi di wilayah tersebut.

Kemampuan ekonomi suatu daerah juga secara langsung memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat, yang salah satunya dapat dilihat melalui pola konsumsi rumah tangga. Tingkat kesejahteraan rumah tangga dapat diukur melalui besarnya pendapatan dan konsumsi/ pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran makanan dan bukan makanan dapat menggambarkan bagaimana masyarakat



mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya, semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi pula pengeluaran rumah tangga. Pemenuhan kebutuhan makanan mulai tahun 2021 sampai dengan 2024 cenderung menurun, di mana pada tahun 2024 menurun menjadi 41,51% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya untuk pemenuhan non makanan pada tahun 2020 sebesar 50,14%, meningkat menjadi 58,49% di tahun 2024.

Rata-rata Pengeluaran Penduduk Menurut Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.70
Rata-Rata Pengeluaran Penduduk Menurut Pengeluaran Makanan dan Non Makanan di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Rata-rata Pengeluaran Penduduk	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
1. Makanan	49,86	49,92	48,85	43,65	41,51
2. Non Makanan	50,14	50,08	51,15	56,35	58,49
Jumlah	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2024

Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian dan pengendalian inflasi, maka dilakukan langkah-langkah antisipasi, seperti penguatan dalam pelaksanaan operasi pasar di beberapa daerah yang terkendala pasokan barang dan jasa. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mencegah disparitas harga antar kabupaten/kota. Langkah tersebut sebagai Upaya dalam menjaga stok kebutuhan pokok bagi Masyarakat. Pemerintah Kabupaten Klaten sudah cukup baik dalam menekan disparitas harga, capaiannya di tahun 2023 sebesar 1,01.

Keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari banyaknya jumlah pemuda yang bekerja. Salah satu indikator kemandirian pemuda dapat dilihat dari persentase Pemuda yang berusaha sendiri/berwirausaha. Dengan adanya kewirausahaan pemuda diharapkan mampu menciptakan lapangan usaha sendiri, mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesempatan bekerja. Capaian rasio kewirausahaan tahun 2023 sebesar 67,18%.

Pemerintah terus berusaha mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan masyarakat. Salah satu strateginya adalah membentuk dan memberdayakan koperasi dan UMKM. Karena UMKM sangat strategis dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Keberadaan koperasi dan UMKM sebagai pelaku usaha memiliki peranan penting. Koperasi dan UMKM diyakini mampu menopang ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus menjadi wahana penciptaan lapangan kerja. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB capaiannya meningkat dari 0,99% ditahun 2019 menjadi 1,24% ditahun 2023.



Tabel 2.71
Perkembangan Capaian Pembangunan Urusan Perdagangan
Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
Disparitas Harga	%	1,09	1,07	1,04	1,01	12,80
Rasio Kewirausahaan	%	3,00	2,56	2,20	2,88	3,30
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	1,31	1,35	1,22	1,24	1,13

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM dan Perdagangan Kabupaten Klaten, 2023

Beberapa upaya dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi antara lain dengan melakukan pembinaan pedagang kaki lima beserta kelembagaannya, pembinaan bagi UMKM dalam bentuk fasilitasi pameran untuk produk UMKM baik di tingkat lokal dalam kabupaten maupun pengiriman UMKM untuk mengikuti pameran ditingkat nasional, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih cinta produk lokal, menerapkan Sistem Penjualan Sistem Online, fasilitasi permodalan bagi pelaku usaha. Hal ini juga mendukung percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sesuai dengan amanat Inpres No. 2 tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka menyukseskan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah. Selain itu juga gerakan cinta produk lokal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penggunaan Slogan Aku Cinta Produk Klaten.

Pada tahun 2024, perkembangan toko swalayan di Kabupaten Klaten mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya persaingan dengan platform perdagangan daring (online marketplace), perubahan perilaku konsumen yang lebih memilih berbelanja secara online, serta tantangan ekonomi pasca pandemi yang memengaruhi daya beli masyarakat. Selain itu, tingginya biaya operasional dan persyaratan perizinan juga menjadi kendala bagi keberlangsungan usaha toko swalayan di daerah. Pada tahun 2024 terdapat 400 toko swalayan dan terjadi penurunan sebanyak 376 toko swalayan atau 48,5% jika dibandingkan dengan tahun 2023 terdapat 776 toko swalayan.

Tabel 2.72
Pasar Menurut Jenisnya di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

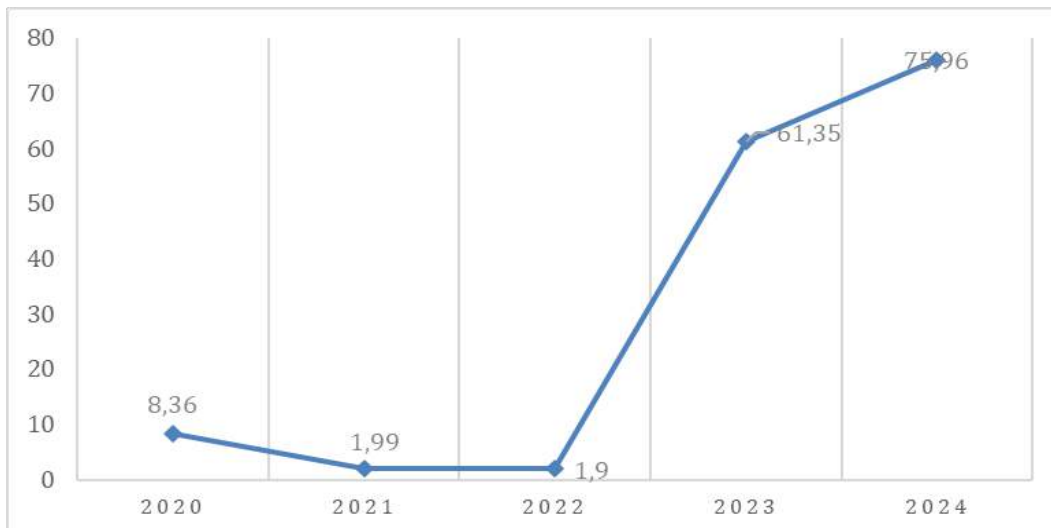
Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Toko Swalayan	604	705	759	776	400
Pasar Umum/Rakyat	85	85	91	91	91
Pasar Hewan	12	12	10	10	10
Pasar Buah	1	1	1	1	1



Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pasar Sepeda	4	4	1	1	2
Pasar Ikan	0	0	0	-	-
Lain-Lain / Pasar Burung	3	3	2	1	1
Pasar Klitikan	1	1	1	1	1
Jumlah	710	811	865	881	506

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM dan Perdagangan Kabupaten Klaten, 2023

Cakupan bina kelompok usaha informal menunjukkan kondisi fluktuatif. Pada tahun 2019 sebesar 8,36% selanjutnya di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 1,99% kemudian menunjukkan peningkatan hingga di tahun 2024 menjadi 75,06%. Peningkatan ini mencerminkan upaya yang lebih intensif dari pemerintah daerah dalam memberdayakan pelaku usaha informal melalui berbagai program pendampingan, pelatihan dan akses permodalan.



Sumber: Dinas Koperasi dan UKM dan Perdagangan Kabupaten Klaten, 2024

Gambar 2.89 Cakupan Bina Kelompok Usaha Informal di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Konsep ekonomi syariah memberikan alternatif sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, fokus pada keadilan, keseimbangan dan kemaslahatan masyarakat. Sistem ini juga menjaga aspek spiritualitas dalam kegiatan ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan dapat menjadi solusi untuk berbagai tantangan ekonomi modern seperti ketimpangan dan krisis keuangan. Sebagai upaya pendukung pengembangan ekonomi syariah, Kabupaten Klaten bekerjasama dengan Kementerian Agama dalam melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM baik usaha mikro maupun industri kecil, terutama pada sektor makanan olahan, obat herbal dan air minum dalam kemasan. Pendampingan ini tidak hanya fokus pada



peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga pada fasilitasi sertifikat halal sebagai bentuk jaminan kualitas dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hingga tahun 2025 tercatat sebanyak 11.013 kelompok usaha (mikro, kecil dan menengah) di Kabupaten Klaten telah memperoleh sertifikat halal. Capaian ini menunjukkan peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya standar halal dalam memperluas akses pasar, baik domestik maupun global.

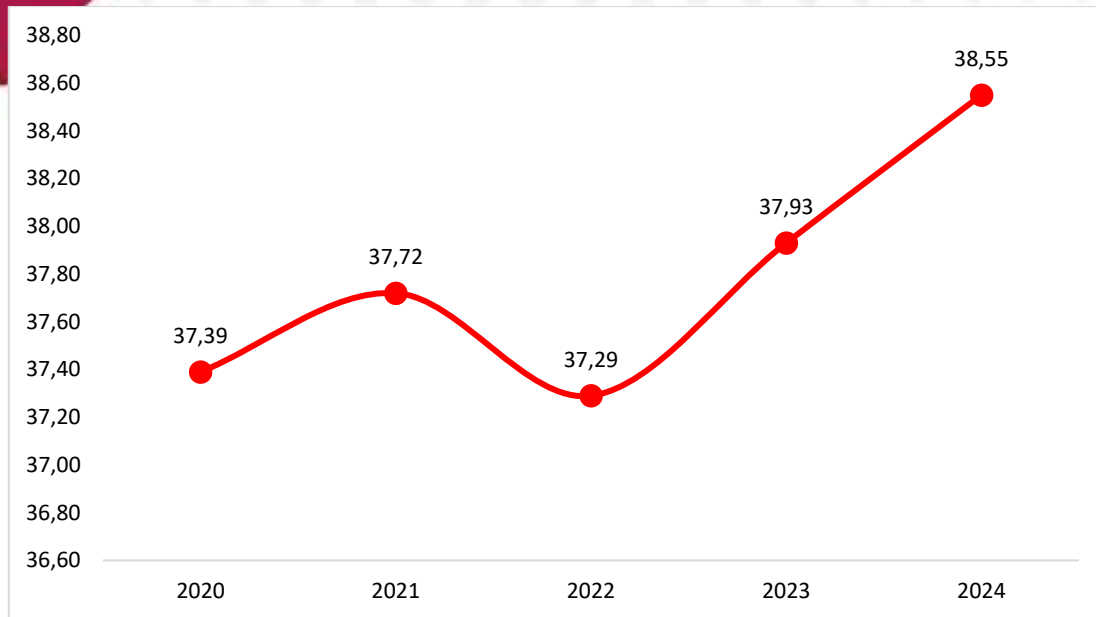
Berdasarkan klasifikasi menurut jenis usaha, sertifikasi halal didominasi oleh kelompok makanan dan minuman, dengan rincian hingga tahun 2025 tercatat sebanyak 10.824 usaha mikro dan 143 usaha kecil, sementara jumlah sertifikasi halal pada kelompok jasa dan obat relatif masih terbatas. Komposisi ini menunjukkan bahwa sektor makanan/ minuman masih menjadi prioritas utama sekaligus potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah di Kabupaten Klaten, namun di sisi lain juga membuka peluang untuk memperluas cakupan sertifikasi pada sektor jasa dan obat herbal di masa mendatang.

Tabel 2.73
Jumlah Produk UMKM Yang Bersertifikasi Halal Kabupaten Klaten
Tahun 2020 – 2024

Tahun	Kelompok Usaha			Kelompok Menurut Jenis								
				Jasa			Makanan/Minuman			Obat		
	Mikro	Kecil	Menengah	Mikro	Kecil	Menengah	Mikro	Kecil	Menengah	Mikro	Kecil	Menengah
2020	10	6	0	0	1	0	10	1	0		4	0
2021	42	1	1	2	0	1	39	1	0	1	0	0
2022	595	2	0	2	0	0	579	2	0	14	0	0
2023	7.079	116	0	5	0	0	7069	116	0	5	0	0
2024	3.095	22	0	7	1	0	3086	21	0	2	0	0
2025	42	2	0	1	0	0	41	2	0		0	0
Jumlah	10.863	149	1	17	2	1	10.824	143	0	22	4	0

Sumber : Kementerian Agama Kab. Klaten, 2025, di olah

Peran sektor industri pengolahan masih memegang peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Klaten. Hal ini terlihat dari rasio PDRB sektor industri pengolahan yang selama lima tahun terakhir menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020, rasio tercatat sebesar 37,39%, meningkat menjadi 37,72% pada tahun 2021. Meskipun sempat mengalami penurunan menjadi 37,29% pada tahun 2022, sektor ini kembali menunjukkan pertumbuhan hingga mencapai 38,55% pada tahun 2024. Data ini mencerminkan bahwa sektor industri pengolahan tetap menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten.



Sumber: Disperinaker Kab. Klaten, 2024

Gambar 2.90 Perkembangan Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Pertumbuhan sektor lapangan usaha industri pengolahan di Kabupaten Klaten dari tahun 2020-2023 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2020 mengalami kontraksi yang cukup dalam menjadi -1,20% dampak adanya pandemi Covid19. Sedangkan pada tahun 2021 mulai mengalami peningkatan menjadi 3,68% dan tahun 2022 kembali meningkat menjadi 3,91%. Tahun 2023 mengalami sedikit penurunan karena pelaku usaha yang sebelumnya dari buruh pabrik kembali bekerja di pabrik dan meninggalkan usahanya. Untuk sektor lapangan usaha industri pengolahan saat ini sudah mulai bangkit dan pulih kembali walaupun belum kembali pulih secara normal jika di banding sebelum adanya pandemi Covid-19. Guna mendukung percepatan pemulihan pertumbuhan ekonomi di sektor industri untuk mendukung Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sebagaimana yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia melalui gerakan cinta produk lokal, maka perlu adanya peran pemerintah untuk memfasilitasi pelaku IKM untuk meningkatkan daya saing produk yang berorientasi ekspor. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Klaten, sebab dalam hal kontribusi terhadap PDRB kabupaten, sektor industri memiliki peran cukup besar. Perkembangan perindustrian berdasarkan pertumbuhan dan kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Klaten selama Tahun 2020-2024.